



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016 – 2035**



**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG
2017**

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016 - 20135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi.

Perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan potensi yang dimiliki. Potensi bukan saja bias menjawab masalah, lebih dari itu bisa berpengaruh dan berefek multi sektoral.

Pembangunan ekonomi selama setengah abad terakhir telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian ke sektor industri. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun tajam, dari 56.3% (1962) menjadi hanya 14.23% (2015). Pada periode yang sama, sektor industri (manufaktur dan non manufaktur) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 11,9% (1962) menjadi sekitar 24% (2015), dan kini menjadi kontributor utama PDB.

Terjadinya pergeseran pembangunan ekonomi dari berbasis agraris ke industri memang merupakan keniscayaan, bahkan bisa dikatakan sebuah keharusan ketika negara atau daerah ingin maju. Industri telah merubah dan menjadikan barang ekstraktif (bahan mentah biasanya dari pertanian) melalui tahap *processing* dan menghasilkan output berupa barang sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi (*value added*).

Namun beberapa tahun terakhir ini sektor industri cenderung mengalami trend negatif. Penyebabnya antara lain kelesuan ekonomi global, pelemahan kurs rupiah, naiknya tarif listrik dan naiknya upah buruh.

Penurunan pertumbuhan sektor industri lebih banyak dialami oleh industri migas karena turunnya harga minyak di tingkat internasional, namun industri non migas justru tumbuh positif dan memberi kontribusi lebih dari 72% terhadap PDB sektor industri. Kontribusi industri non migas di tengah kelesuan ekonomi nasional dan global selama tiga tahun terakhir tumbuh positif rata-rata 1,3% pertahun.

Selain itu sektor industri yang 72% terpusat di Pulau Jawa telah mengalami keterbatasan sumber daya dan kejenuhan pasar, sehingga saat ekonomi lesu dibarengi dengan meningkatnya *cost* karena tuntutan buruh dan *social cost* lainnya berpengaruh pada daya tahan sektor industri untuk tumbuh. Pertumbuhan sektor industri mulai banyak didukung dan disumbang oleh industri di luar Pulau Jawa.

Sebagai daerah agraris, struktur perekonomian daerah berbasis pertanian adalah sesuatu yang lumrah. Persoalannya, struktur perekonomian berbasis pertanian ternyata tidak memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ini sudah berlangsung sangat lama.

Peningkatan produktivitas pertanian memang terus dilakukan, namun tidak memiliki nilai tambah tinggi karena keterbatasan teknologi *processing* yang menjadi kebutuhan pasar. Teknologi *processing* guna mempertinggi nilai tambah hasil produksi pertanian bisa dilakukan melalui industri pengolahan. Sebagai daerah berbasis agraris, Provinsi Lampung pantas menyiapkan regulasi jangka panjang menyiapkan strategi industrialisasi berbasis pertanian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14

tahun 2015. Selanjutnya RIPIN menjadi acuan bagi gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagaimana Pasal 4 huruf b.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung Tahun 2016-2035 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Di dalam RIPIN, Provinsi Lampung memiliki 5 (lima) WPPI yaitu Kabupaten/Kota yang berada dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Sumatera Bagian Selatan meliputi: Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Kelima WPPI di Provinsi Lampung tersebut menjadi pusat pertumbuhan industri: pangan; hulu agro; logam dan bahan galian bukan logam; kimia dasar berbasis migas dan batubara; dan alat transportasi.

Provinsi Lampung memiliki wilayah seluas 35.288,35 km² dengan batas-batas wilayah adalah:

- Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Sebelah Selatan : Selat Sunda
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2016, jumlah penduduk Provinsi Lampung Tahun 2016 berjumlah sekitar 9.549.079 jiwa, dimana 4.951.035 jiwa laki-laki dan 4.598.044 jiwa perempuan. (lampung.bps.go.id).

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2010-2014 secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun (2010-2015) adalah sebesar 5.98%.

Sesuai dengan potensi sumber daya alam Provinsi Lampung, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri makanan dan minuman (pangan), karet-barang dari karet-dan plastik, kimia- farmasi dan obat tradisional yang merupakan komoditi utama daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPIP Lampung adalah:

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 ayat (1) setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, atau Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIP Provinsi Lampung tahun 2016 – 2035 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri provinsi.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan dasar hukum dalam penyusunan RPIP Provinsi Lampung.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika dalam penyusunan RPIP Provinsi Lampung.

II. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

2.1. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

2.2. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

2.3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

III. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Lampung mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. RPIP Provinsi Lampung ini merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Menguraikan tujuan Pembangunan Industri Provinsi Lampung, sebagai penjabaran lebih lanjut, visi dan misi pembangunan Lampung dalam bidang industri.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri non migas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

4.1. Strategi Pembangunan Regional

Menjelaskan tentang pembagian wilayah klaster pembangunan berdasarkan pada potensi dan fungsi kewilayahan.

4.2. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

4.3. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi
Penentuan industri unggulan provinsi berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama dua puluh tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. KONDISI DAERAH

a. Geografi

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara Pulau Sumatera, dan dibatasi oleh :

1. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara
2. Selat Sunda, di sebelah Selatan
3. Laut Jawa, di sebelah Timur
4. Samudra Indonesia, di sebelah Barat

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah "Radin Inten II", yaitu nama baru dari "Branti", 28 Km dari Ibu kota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan ada dua lapangan terbang milik TNI, yaitu Lapangan Terbang TNI AD Gatot Subroto di Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan Lapangan Terbang AURI di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur – Barat berada antara : 103°40" -105° 50" Bujur Timur, Utara - Selatan berada antara: 6°45' - 3° 45' Lintang Selatan

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964

Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibu kota Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
2. Kabupaten Tanggamus dengan ibu kota Kota Agung, luas wilayahnya 3.020,64 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibu kota Kalianda, luas wilayahnya 3.319,04 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibu kota Sukadana, luas wilayahnya 5.325,03 Km² terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi, luas wilayahnya 2.725,87 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
7. Kabupaten Way Kanan dengan ibu kota Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.921,63 Km² terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan.
8. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota Menggala, luas wilayahnya 3.196,32 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibu kota Gedong Tataan, luas wilayahnya 2.243,51 Km² terdiri dari 11 (Kecamatan) kecamatan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibu kota Pringsewu, luas wilayahnya 625,00 Km² terdiri 9 (sembilan) kecamatan.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibu kota Mesuji, luas wilayahnya 2.184,00 Km² terdiri 7 (tujuh) kecamatan.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibu kota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.201,00 Km² terdiri 8 (delapan) kecamatan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota Krui, luas wilayahnya 2 907,23 Km² terdiri 11 (sebelas) kecamatan.

14. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 192,96 Km² terdiri dari 20 {dua puluh} kecamatan.
15. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) kecamatan.

Secara geostrategik, posisi Provinsi Lampung berada pada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, melintasi Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda untuk terus ke Lautan atau Samudra Hindia¹.

b. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK	LAJU PER- TUMBUHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN (JIWA/ KM2)
		LK	PR				
1	Lampung Barat	155,804	137,301	293,105	1.22	2,043.17	145.49
2	Tanggamus	299,214	274,690	573,904	1.41	2,731.61	232.5
3	Lampung Selatan	499,385	473,194	972,579	1.35	2,007.01	627.87
4	Lampung Timur	516,079	492,718	1,008,797	0.78	4,337.89	254.96
5	Lampung Tengah	630,962	608,134	1,239,096	1	4,789.82	302.69
6	Lampung Utara	308,083	298,009	606,092	0.83	2,725.63	322.45
7	Way Kanan	223,116	209,798	432,914	1.4	3,921.63	120.57
8	Tulang Bawang	222,380	207,135	429,515	2.61	4,385.84	94.76
9	Pesawaran	219,587	206,802	426,389	1.29	1,173.77	462.9
10	Pringsewu	198,304	188,587	386,891	0.55	625	725.64
11	Mesuji	102,417	93,265	195,682	1.17	2,184.00	138.61
12	Tulang Bawang Barat	135,811	128,901	264,712	1.17	1,201.00	209.16
13	Pesisir barat	78,693	71,197	149,890	-	2,907.23	52.88
14	Bandar Lampung	493,411	485,876	979,287	1.59	192.96	6,048.41
15	Metro	79,191	79,224	158,415	1.95	61.79	2,619.03
Provinsi Lampung		4,162,437	4,162,437	3,954,831	8,117,268	35,288.35	270.6

Sumber : BPS Lampung, 2015

Salah satu ciri demografi Provinsi Lampung adalah pesebaran yang belum merata antar kabupaten/kota. Sebagian besar penduduk Provinsi Lampung berada di daerah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung 1,51% dan Kota Metro 0,31% dari luas total wilayah Provinsi Lampung. Namun tingkat

¹**Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002, Pembagian ALKI terdiri atas ALKI I melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda; ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok; dan ALKI III Melintas Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu.

kepadatan penduduk di kedua kota ini sangat tinggi, yaitu mencapai 3.611 jiwa per kilometer persegi di Kota Bandar Lampung dan 23.363 jiwa per kilometer persegi di Kota Metro pada tahun 2020, hal ini berbanding terbalik dengan dua daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Barat dengan luas daerah 14,81 persen dan Kabupaten Mesuji sekitar 11,12 persen dari total luas wilayah provinsi Lampung, tetapi tingkat kepadatan penduduknya hanya mencapai 54 jiwa perkilometer di Kabupaten Pesisir Barat dan 92 jiwa per kilometer di Kabupaten Mesuji pada tahun 2020.

Tingkat kepadatan penduduknya sangat rendah di daerah yang banyak perdesaan, disebabkan selain kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan lebih banyak dan upah yang lebih tinggi, hal lain juga dikarenakan fasilitas kehidupan yang memadai dan lengkap di daerah perkotaan.

c. Ekonomi Makro Regional

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2015 lebih baik karena pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh sektor cenderung positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pada PDRB Brutto pertumbuhan terbesar pada Sektor Transportasi dan Pergudangan sekitar 11,66%, disusul Sektor Informasi dan Komunikasi sekitar 10.84%, dan Sektor Pemerintahan sekitar 9.79%. Perkembangan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. PDRB Provinsi Lampung atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015

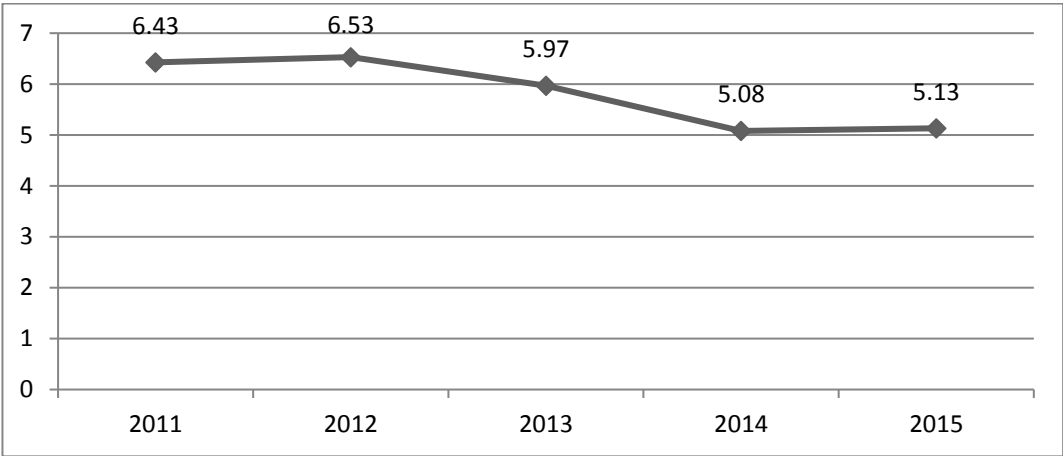
No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	54,841,031.00	56,997,473.17	59,636,487.79	61,655,601.22	63,932,022.01
B	Pertambangan dan Penggalian	9,757,014.14	1,030,3929.1	11,485,798.88	11,592,348.12	12,079,303.38
C	Industri Pengolahan	27,146,426.78	29,677,128.61	31,973,934.77	33,414,650.44	35,912,938.92
D	Listrik dan Gas	140,402.82	161,678.16	179,418.03	195,179.71	203,872.8023
E	Air Bersih, Pengolahan Sampan, Limbah dan Daur Ulang	176,577.59	185,094.42	182,183.66	195,830.39	200,669.6442
F	Konstruksi	14,336,717.39	15,259,752.72	1,580,6448.1	17,023,886.19	17,413,157.89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sep Motor	19,776,844.70	20,813,161.02	21,431,655.47	22,713,949.81	23,163,980.58
H	Transportasi dan Pergudangan	6867,518.44	7,578,029.84	8,135,378.62	8,757,695.08	9,779,649.117
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,936,229.65	2,119,584.03	2,242,989.97	2,416,469.08	2,632,962.344
J	Informasi dan Komunikasi	5,620,478.67	6,372,263.98	6,969,231.55	7,584,986.2	8,406,948.856
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,304,941.58	3,691,722.96	3,956,853.47	4,043,055.5	4,143,423.752
L	Real Estate	4,451,859.26	482,0945.8	5,301,395.57	5,709,667.45	5,966,146.543
M, N	Jasa Perusahaan	191,610.67	218,239.69	244,412.09	264,091.57	285,141.6501

O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	4,968,667.70	5,274,721.38	5,406,075.52	5,850,911.7	6,423,699.117
P	Jasa Pendidikan	4,116,944.44	4,302,016.87	4,526,262.74	5,027,311.54	5,361,599.199
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,414,398.23	1,578,687.77	1,694,907.15	1,781,589.34	1,902,988.347
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	1,389,838.32	1,414,777.09	1,463,224.32	1,582,235.2	1,716,915.65
Total PDRB		160,437,501.38	170,769,206.6	180,636,657.7	189,809,458.5	199,525,419.8

Sumber: PDRB Lampung 2011-2015, BPS 2016

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2011-2015 secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2011-2015 tumbuh secara berturut-turut: 6.43% (2011), 6.53% (2012), 5.97% (2013) 5.08% (2014), dan 5.13% (2015). Secara rata-rata pertumbuhan selama lima tahun (2011-2015) adalah sebesar 5.83%, sebagaimana Gambar 2.1.

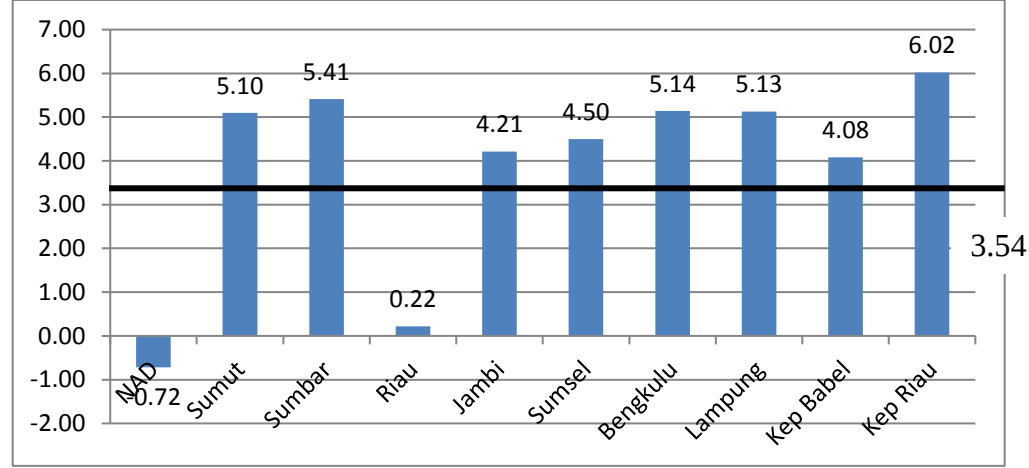
Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2011-2015



Sumber: BPS, 2015 dan KEKR BI, Tr IV. Feb 2016

Berdasarkan perhitungan PDRB Provinsi Lampung laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan penurunan akibat pengaruh ekonomi nasional yang lesu. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 5.13 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 4.79%. Dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yang hanya 3.54 persen.Perbandingan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2015



Sumber: Lap. Bulanan Data Sosek, BPS, April 2016

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja di sektor pertanian (perikanan dan kehutanan) dan sektor industri pengolahan.

Struktur perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (31.86%), sektor industri pengolahan (19.31%), dan sektor perdagangan besar dan eceran (10.74%). Sesuai dengan Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015

No.	Sektor	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33.16	32.69	31.86
2	Pertambangan & Penggalian	6.39	6.3	5.67
3	Industri Pengolahan	17.65	18.03	19.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.07
5	Pengadaan Air	0.1	0.1	0.11
6	Bangunan (konstruksi)	8.73	8.9	8.49
7	Perdagangan Besar dan Eceran	11.33	11.01	10.74
8	Transportasi dan Pergudangan	4.49	4.65	5.13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.4	1.45	1.51
10	Informasi dan Komunikasi	3.54	3.45	3.55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.36	2.26	2.20
12	Real Estate	2.73	2.83	2.87
13	Jasa Perusahaan	0.14	0.15	0.15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.35	3.54	3.69
15	Jasa Pendidikan	2.84	2.84	2.80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.93	0.92	0.97
17	Jasa Lainnya	0.79	0.8	0.87
	Pertumbuhan	5.78	5.08	5.13

Sumber : PDRB Lampung 2011-2016, BPS 2016

Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor jasa pendidikan dengan pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 11,07%, sektor

informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 8.84%, dan sektor pengadaan listrik dan gas tertinggi ketiga sebesar 8.78%.

Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian Provinsi Lampung adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan-hotel dan restoran, dengan pertumbuhan masing-masing sektor selama tiga tahun terakhir adalah 3.98%, 7.19%, dan 4.73% pertahun.

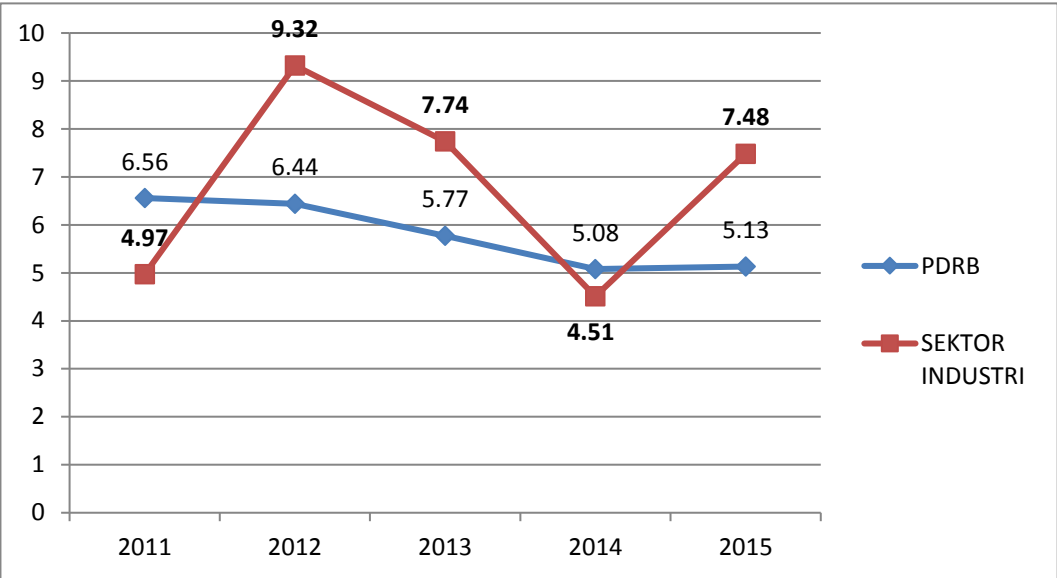
Sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren negatif sekitar 2 % pertahun dan sektor perdagangan juga mengalami hal yang sama turun sekitar 3 % pertahun. Sebaliknya sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan dengan tren positif, walaupun hanya 1 % pertahun.

d. Sektor Industri

1) Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

Secara rata-rata dalam periode 2011-2015 sektor industri pengolahan tanpa migas menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu sekitar 9.32%. Namun dua tahun berselang menunjukkan tren negatif hingga 4.51% tahun 2014, dan menunjukkan pemulihan tahun 2015 hingga mencapai 7.48%. Bahkan pertumbuhannya ini melampaui pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung yang hanya 5.13 %. Secara rinci perkembangan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat pada Gambar 2.3.

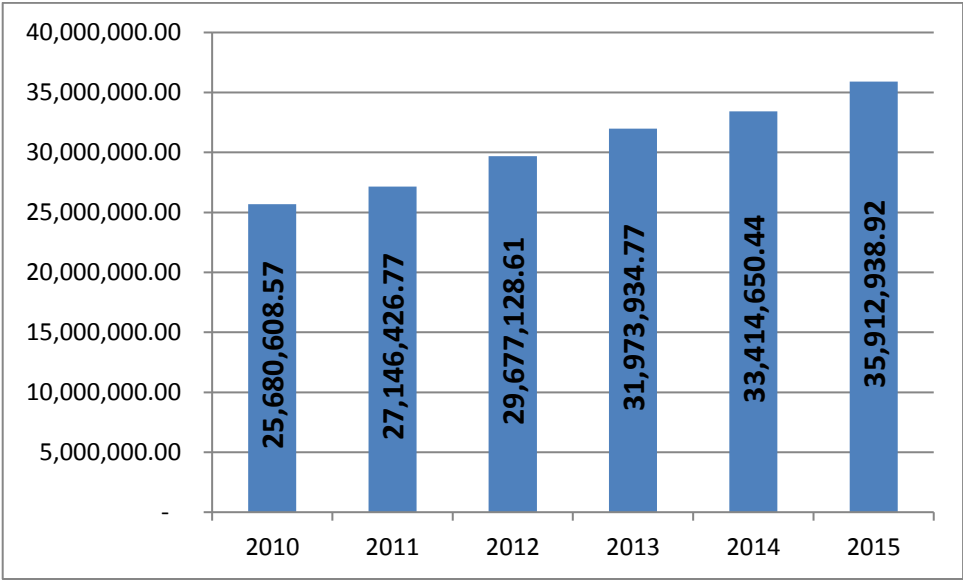
Gambar 2.3. Perkembangan Pertumbuhan PDRB dan Sektor Industri Pengolahan (Non migas) Provinsi Lampung Tahun 2011-2015



Sumber: PDRB Lampung 2011-2016, BPS 2016

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri berdampak baik pada nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, sebagaimana Gambar 2.4. berikut:

Gambar 2.4. PDRB dan Sektor Industri Pengolahan Prov. Lampung tahun 2010-2015



Sumber: PDRB Lampung 2010-2015, BPS 2016

Secara rinci pendapatan *bruto* seluruh cabang usaha Industri Pengolahan dapat dilihat pada table 2.4. berikut :

Tabel 2.4. PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

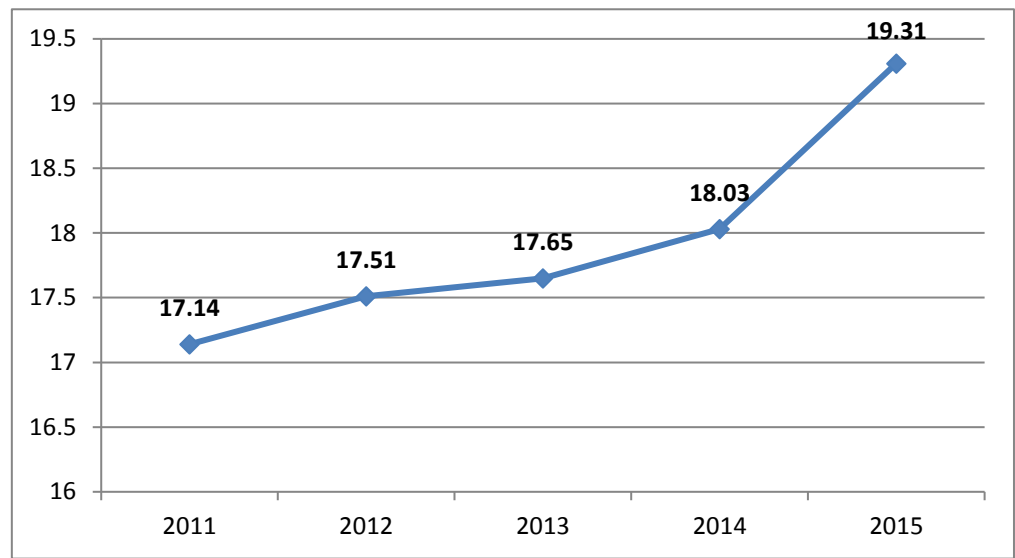
LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015
INDUSTRI PENGOLAHAN	27,146,426.77	29,677,271.73	31,973,934.77	33,414,650.44	35,912,938.92
1. Pengilangan Minyak Bumi & Batubara	34,063.61	22,277.79	14,723.46	15,574.67	16,360.51
2. Makanan dan Minuman	18,474,647.92	20,430,983.59	22,165,876.53	23,106,049.58	25,154,820.45
3. Pengolahan Tembakau	14,141.61	16,861.31	18,208.11	19,057.95	20,244.99
4. Tekstil dan Pakaian jadi	15,795.72	16,967.47	18,967.47	19,955.27	20,649.65
5. Kulit, Brg dr Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-
6. Kayu, Brg dr kayu & Gabus, Anyaman dr Bambu	411,372.81	423,600.81	451,692.25	461,024.18	490,275.72
7. Kertas, Brg dr Kertas, Percetakan & Reproduksi Media Rekaman	239,895.99	242,530.28	248,703.97	278,963.51	295,281.85
8. Kimia, Farmasi & Obat Tradisional	2,028,351.02	2,229,557.13	2,447,889.52	2,551,010.91	2,672,450.92
9. Karet, Brg dr Karet & Plastik	2,850,060.79	3,103,704.98	3,201,761.07	3,351,963.30	3,463,628.99
10. Barang Galian Bukan Logam	1,694,343.89	1,838,047.77	1,971,477.16	2,102,426.11	2,167,375.38
11. Logam Dasar	98,859.17	107,068.42	114,207.45	120,454.94	132,394.73
12. Barang Logam, Komputer, Elektroik, Optik & Peralatan Listrik	196,912.91	197,522.25	222,870.91	229,666.98	256,358.44
13. Mesin & Perlengkapan	855,254.61	804,113.08	841,001.87	888,801.56	936,510.89
14. Alat Angkutan	90,045.43	95,537.08	100,075.91	106,128.90	115,439.81
15. Furniture	103,142.03	105,910.37	113,522.53	118,146.66	121,954.34
16. Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi & Pemasangan Mesin dan Peralatan	39,539.26	42,589.40	42,956.56	45,425.92	49,192.25
PDRB	160,437,501.38	170,769,206.61	180,636,657.69	189,809,458.54	199,525,419.79

Sumber: PDRB Lampung 2011-2015, BPS

Pada tabel di atas PDRB Sektor Industri mencapai Rp. 35.912.938.920.000,-, dengan peroleh tertinggi pada cabang usaha Industri Makanan dan Minuman sebesar Rp. 25.154.820.450.000,-. Peningkatan pendapatan *bruto* Sektor Industri Pengolahan selama kurun waktu tersebut rata-rata meningkat hampir 7% pertahun.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Industri tahun 2015 berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB menjadi 19.31 persen, seperti Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Perkembangan Kontribusi (share) Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun2011-2015



Sumber: PDRB Lampung 2011-2015, BPS 2016

Perkembangan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Lampung selama 2011-2015 terus menunjukkan peningkatan. Dari 16 jenis cabang usaha Sektor Industri, maka penyumbang terbesarnya adalah pada cabang Industri Makanan dan Minuman rata-rata lebih dari Rp. 2,04 triliun pertahun selama 2011-2015. Ini berarti sekitar 68.76% pendapatan sektor industri pengolahan berasal dari cabang Industri Makan dan Minuman. Cabang usaha industri yang juga cukup besar kontribusinya selain makanan dan minuman adalah Industri Karet dan Bahan dari Karet dengan nilai sekitar Rp. 309 miliar atau 10.44%, dan kelompok Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional rata-rata 7.46%. Sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Distribusi Sub Sektor pada Sektor Industri Pengolahan Propinsi Lampung ADHK Tahun 2011-2015

INDUSTRI PENGOLAHAN	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pengilangan Minyak Bumi & Batubara	0.13%	0.08%	0.05%	0.05%	0.05%
2. Makanan dan Minuman	68.06%	68.84%	69.32%	69.15%	70.04%
3. Pengolahan Tembakau	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
4. Tekstil dan Pakaian jadi	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
5. Kulit, Brg dr Kulit & Alas Kaki	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6. Kayu, Brg dr kayu & Gabus, Anyaman dr Bambu	1.52%	1.43%	1.41%	1.38%	1.37%
7. Kertas, Brg dr Kertas, Percetakan &	0.88%	0.82%	0.78%	0.83%	0.82%

Reproduksi Media Rekaman					
8. Kimia, Farmasi & Obat Tradisional	7.47%	7.51%	7.66%	7.63%	7.44%
9. Karet, Brg dr Karet & Plastik	10.50%	10.46%	10.01%	10.03%	9.64%
10. Barang Galian Bukan Logam	6.24%	6.19%	6.17%	6.29%	6.04%
11. Logam Dasar	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.37%
12. Barang Logam, Komputer, Elektroik, Optik & Peralatan Listrik	0.73%	0.67%	0.70%	0.69%	0.71%
13. Mesin & Perlengkapan	3.15%	2.71%	2.63%	2.66%	2.61%
14. Alat Angkutan	0.33%	0.32%	0.31%	0.32%	0.32%
15. Furniture	0.38%	0.36%	0.36%	0.35%	0.34%
16. Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi & Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.15%	0.14%	0.13%	0.14%	0.14%

Sumber : PDRB Lampung 2011-2015, BPS 2016

Sektor industri tanpa migas di Provinsi Lampung selain industri makanan dan minuman, juga ditopang oleh industri industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 10.03%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional sekitar 7.63%, dan Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar 6.29%. Kontribusi masing-masing kelompok industri sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Nilai Tambah Cabang Industri dalam Pembentukan PDRB Sektor Industri Tahun 2015

No.	Kelompok Industri	Nilai Tambah (Rp)	Persentase (%)
1	Pengilangan Minyak Bumi & Batubara	16,360.51	0.05%
2	Makanan dan Minuman	25,154,820.45	70.04%
3	Pengolahan Tembakau	20,244.99	0.06%
4	Tekstil dan Pakaian jadi	20,649.65	0.06%
5	Kulit, Brg dr Kulit & Alas Kaki	0	0.00%
6	Kayu, Brg dr kayu & Gabus, Anyaman dr Bambu	490,275.72	1.37%
7	Kertas, Brg dr Kertas, Percetakan & Reproduksi Media Rekaman	295,281.85	0.82%
8	Kimia, Farmasi & Obat Tradisional	2,672,450.92	7.44%
9	Karet, Brg dr Karet & Plastik	3,463,628.99	9.64%
10	Barang Galian Bukan Logam	2,167,375.38	6.04%
11	Logam Dasar	132,394.73	0.37%
12	Barang Logam, Komputer, Elektroik, Optik & Peralatan Listrik	256,358.44	0.71%
13	Mesin & Perlengkapan	936,510.89	2.61%
14	Alat Angkutan	115,439.81	0.32%
15	Furniture	121,954.34	0.34%
16	Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi & Pemasangan Mesin dan Peralatan	49,192.25	0.14%
Jumlah		35,912,938.92	

Sumber : PDRB Lampung 2011-2015, BPS 2016

Nilai tambah sektor industri Provinsi Lampung ditopang oleh industri besar sedang (IBS) yang didominasi oleh industri makanan dan minuman sebanyak 222 unit (73.75%), industri furniture-pengolahan lain-daur ulang reparasi produk logam pabrikan sebanyak 16 unit (5.31%), dan industri karet dan

barang dari plastik sebanyak 15 unit (4.98%). Secara rinci jumlah unit usaha industri pada setiap kelompok sebagaimana Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Jumlah Unit Usaha Masing-Masing Cabang Industri Tahun 2015

No.	Kelompok Industri	Jumlah Unit Usaha	Persentase
1	Makanan dan Minuman/ Tembakau/Tekstil/Pakaian Jadi	222	73.75
2	Kayu/Barang dari Kayu dan Anyaman	11	3.65
3	Kertas/Barang dari kertas/Penerbitan/Percepatan/Reproduksi	5	1.66
4	Batubara/Migas/kimia dan barang dari bahan kimia	10	3.32
5	Karet dan barang dari plastik	15	4.98
6	Barang galian bukan logam	10	3.32
7	Logam Dasat/Barang2 dari logam dan peralatannya	4	1.33
8	Mesin dan Perlengkapannya	8	2.66
9	Furniture dan industri pengolahan/daur ulang reparasi produk logam pabrikan	16	5.32
Jumlah		301	

Sumber : LDA, BPS Lampung, 2015

Ekspor Provinsi Lampung tahun 2014 lebih banyak disumbang oleh ekspor dari hasil industri dengan nilai sebesar US\$942,874.80 atau 45.40%, hasil pertanian dan kehutanan dengan nilai US\$928,095.82 atau 44.69%, dan hasil pertambangan dengan nilai US\$205,776.86 atau 9.91%. Tiga sektor penyumbang nilai ekspor sebagaimana Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Jumlah Ekspor Non Migas Tahun 2015

No.	Kelompok Komoditi	Nilai (Juta US \$)	Persentase
1	Pertambangan	205,776.86	9.91
2	Industri	942,874.80	45.40
3	Pertanian	928,095.82	44.69
Jumlah		2,076,747.48	

Sumber : LDA, BPS Lampung, 2015

2) Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Tahun 2016 penyerapan tenaga kerja pada pada perusahaan besar dan sedang mencapai 60.040 tenaga kerja, cabang industri makanan menerapkan tenaga kerja terbanyak yaitu 46.660 orang. Secara rinci penyerapan tenaga kerja pada setiap cabang industri pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Provinsi Lampung Tahun 2015

No	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Makanan	190	46,660
2	Minuman	2	85
3	Pengolahan Tembakau	1	45
4	Tekstil	1	70
5	Pakaian Jadi	9	608
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	799
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	5	1,240
8	Kertas dan Barang dari Kertas	5	706
9	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4	185
10	Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1	36
11	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	11	1,304
12	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	16	4,775
13	Barang Galian Bukan Logam	10	919
14	Logam Dasar	1	221
15	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan	3	109
16	Mesin dan Perlengkapan	4	814
17	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2	50
18	Alat Angkutan Lainnya	2	199
19	Fumitur	10	949
20	Pengolahan lainnya	3	228
21	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1	38
Jumlah		284	60,040

Sumber: LDA, BPS 2016

Berdasarkan tabel di atas, cabang Industri Makanan menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 77,72% dari total tenaga kerja di sektor industri, kemudian cabang Industri Karet, barang dari karet dan plastik menyerap sekitar 8% tenaga kerja, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sekitar 2.17%.

3) Aspek Pasar

Pasar ekspor Sektor Industri Provinsi Lampung juga didominasi cabang industri makanan dan minuman. Sekitar 79.29 persen dihasilkan dari cabang industri ini. Secara rinci volume ekspor pada masing-masing industri sebagaimana Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Volume Ekspor Sektor Industri Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (ton)

Industri	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Makanan & Minuman	2,318,307	3,342,652	1,616,582	1,634,979	1,653,585.36
Kimia	13,106	13,419	4,473.30	4,542	4,611.76
Karet	27,544	56,057	39,298	41,228	43,252.79
Kerta-Barang kertas	381	946	-	-	-
Galian Bukan Logam	282	26	153	-	-
Mesin & Perlengkapan	-	16	-	-	-

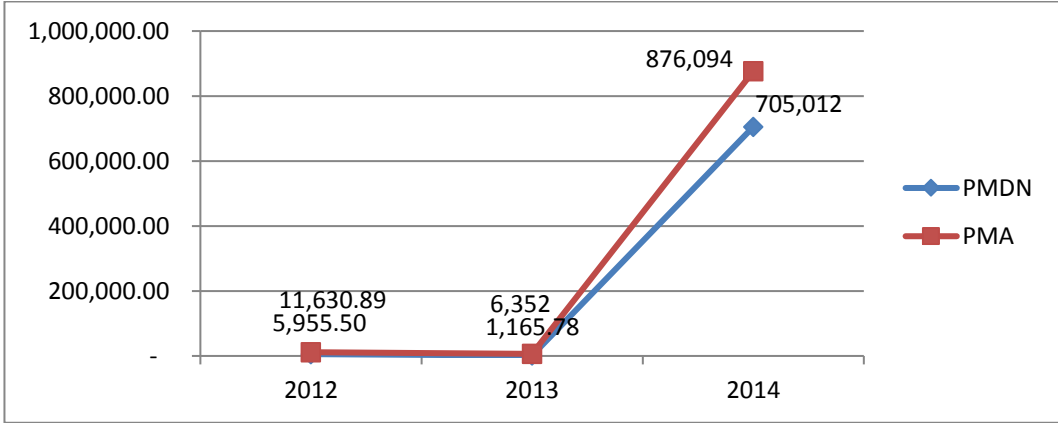
Industri	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Lainnya	451,035	633,394	468,678	740,606	1,170,307.22
Jumlah	2,810,655	4,046,510	2,129,184	2,421,355	2,871,757.12

Sumber: LDA, BPS 2016, Ket : * Angka Proyeksi

4) Kesiapan dan Kesiadaan Pelaku Usaha

Kesediaan dan kesiapan pelaku usaha terhadap pembangunan industri, khususnya industri pangan ditunjukkan dengan peningkatan investasi pada cabang usaha industri ini yang cukup tajam antara tahun 2012-2014, sebagaimana Gambar 2.6. berikut:

Gambar 2.6. Perkembangan Investasi Industri Makanan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2014



Sumber: LDA, BPS 2015

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri tahun 2012-2014 yang meliputi Tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam terbarukan, sumber daya alam tidak terbarukan, Lembaga Pendidikan, lembaga Pelatihan, dan lembaga Litbang, uraian dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2012-2015

No.	Sumber Daya Industri	2012	2013	2014	2015*
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	68,362	71,989	62,301	60,040
2	Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku :				
	a. Kelapa Sawit (ton)	173,376	168,901	172,427	237,021

No.	Sumber Daya Industri	2012	2013	2014	2015*
3	Pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan sebagai bahan baku :				
	a. Batubara	22,277.79	14,723.46	15,574.67	16,360.51
	b. Minyak, Gas, dan Panas Bumi	6,173,773.29	7,084,445.27	6,942,937.70	7,121,793.02
	c. Biji Besi	4,045,346.81	4,306,144.47	4,549,578.43	4,858,975.60
4	Lembaga Pendidikan				
	a. Pendidikan Tinggi				
	- Jumlah (unit pendidikan)	81	73	67	67
	- Kapasitas (orang)				
	b. Sekolah Menengah Kejuruan				
	- Jumlah (unit pendidikan)	301	380	414	414
	- Kapasitas (orang)	9632	12160	15000	15000
5	Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan)	3	3	3	3
6	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	1	1	1	1
7	Jumlah investasi industri (Rp.Milyar)	1,002,211	3,626,578	4,503,019	4,566,061.27

Sumber LDA, BPS 2016

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, pelabuhan, bandara, air, dan listrik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Infrastruktur Pendukung di Provinsi Lampung 2012-2015

Infrastruktur	2012	2013	2014	2015
Panjang jalan :				
a. Nasional (km)	1159.7	1.244	1.256	1159.57
b. Provinsi (km)	1702.81	2.107	2.092	1702.81
c. Kabupaten/Kota (km)	-	17.077	18.383	2382.00
Jumlah pelabuhan (pelabuhan)	25	25	25	25
Jumlah bandara (bandara)	12	12	12	12
Penggunaan Air (m³)	54.8	56.9	60.9	64.21
Pemakaian Listrik (MW)	2,793,359	3,057,800	3,392,429	3,491,253

Sumber : LDA, BPS 2016

Sedangkan uraian 25 pelabuhan dan 12 bandar udara yang ada di Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Rincian Pelabuhan dan Bandar Udara di Lampung

No	Pelabuhan	Jumlah Unit
1	Pelabuhan Penyeberangan (ASDP) Bakauheni	1
2	Pelabuhan Laut	25
3	Udara :	
a.	Umum (Raden Intan dan Pekon Serai)	2
b.	Pangkalan Udara (Gatot Subroto dan Astra Ksetra)	2
c.	Bandara Khusus (GPM, KK, NTF, Tambling, Sungai Buaya, SIP, Way Kambas, Sungai Merah)	8

Sumber: RPJMD Lampung 2015-2019

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan). Perkembangan sarana dan prasarana industri di Provinsi Lampung Tahun 2012-2014dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2013-2015

No.	Sarana dan Prasarana	2013	2014	2015
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan			
a.	Limbah padat	9	10	11
b.	Limbah cair	9	10	11
c.	Limbah udara	9	10	11
2	Jumlah kawasan industri (unit)	1	1	1
3	Jumlah lahan untuk industri (ha)	-	127	400
4	Infrastruktur Penunjang			
a.	lembaga uji (unit)	1	1	1
b.	kawasan berikat (kawasan)	1	1	1
c.	kawasan pergudangan (kawasan)	8	8	8

Sumber LDA, BPS, 2015

Kecuali perkembangan luas lahan 127 Ha (tahun 2013) menjadi 400 Ha (Tahun 2015), prasarana dan sarana industri Infrastruktur pengelolaan (a. Limbah padat, b. Limbah cair, c. Limbah udara), kawasan industri, infrastruktur penunjang indusri (a. lembaga uji, b. kawasan berikat, dan c. kawasan pergudangan) tidak berkembang.

2.4. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2013-2015

No.	Kelembagaan*	2013	2014	2015
1	Sentra IKM (sentra)	1	1	1
2	UPT (unit)	3	3	3
3	TPL (orang)	20	20	20
4	Konsultan/shindansi (orang)	1	2	4
5	Pusat promosi (unit)	1	1	2

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 2015-2019

Sentra IKM di Provinsi Lampung lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

2.5. STRATEGI PEMBANGUNAN REGIONAL

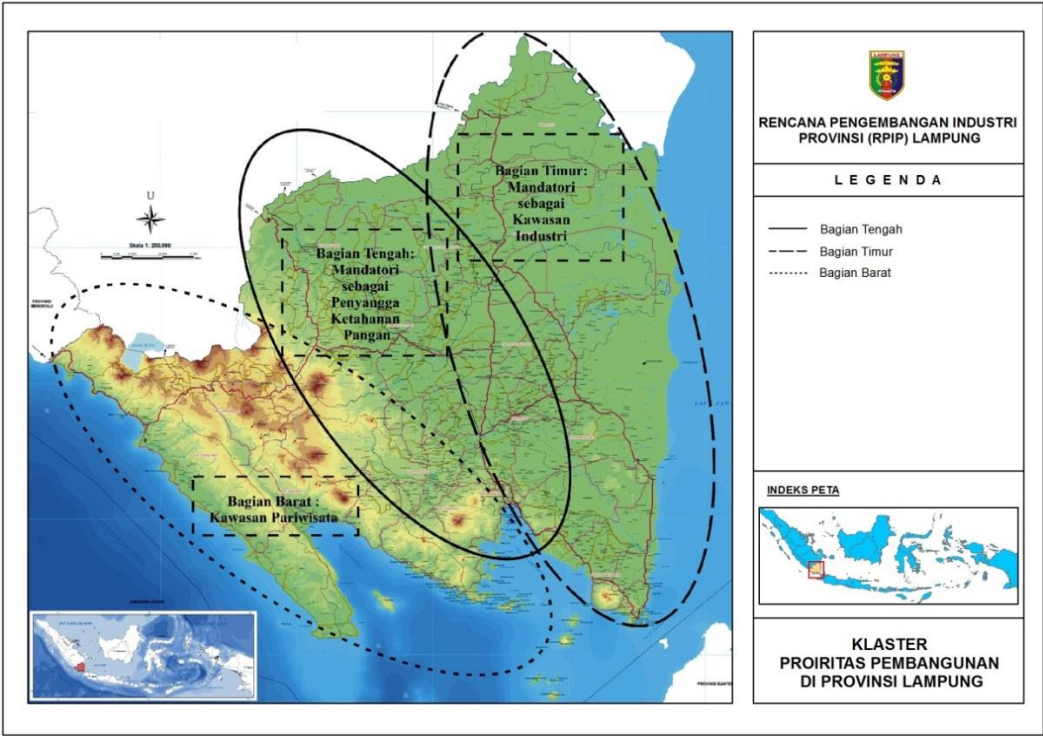
Sebagai provinsi dengan letak geografis berada paling ujung Pulau Sumatera, Provinsi Lampung menjadi jalur utama transportasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Provinsi ini juga diapit dua lautan, Samudra Indonesia dan Laut Jawa, serta Selat Sunda., yang merupakan jalur laut yang terus meningkat aktivitasnya.

Provinsi Lampung juga secara kontur geografi memiliki karakteristik khas antara wilayah bagian barat, tengah dan timur dengan segala potensinya. Karena itu Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 membagi wilayah pembangunan Provinsi Lampung ke dalam tiga klaster wilayah dengan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- 1. Klaster Bagian Barat : Kawasan Pariwisata dan Konservasi TNBBS
- 2. Klaster Bagian Tengah : Kawasan Mandatori Penyangga Ketahanan Pangan
- 3. Klaster Bagian Timur : Kawasan Industri Pengolahan dan Manufaktur

Peta ketiga klaster tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.7:

Gambar 2.7. Klaster Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung



Sumber : RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Klaster Pembangunan Bagian Barat Provinsi Lampung, diarahkan untuk wilayah dengan karakteristik bisnis inti (*core business*) pariwisata dan konservasi TNBBS karena bagian barat sangat kaya dengan potensi pariwisata, pantainya membentang dari Kabupaten Pesisir Barat-Tanggamus-Pesawaran-Bandar Lampung-Lampung Selatan.

Klaster Pembangunan Bagian Tengah Provinsi Lampung, diarahkan sebagai wilayah dengan karakteristik bisnis inti (*core business*) mandatori penyangga ketahanan pangan karena wilayah tengah memiliki potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Klaster Pembangunan Bagian Timur Provinsi Lampung, diarahkan sebagai menjadi wilayah dengan karakteristik bisnis inti (*core business*) kawasan industri pengolahan atau manufaktur karena keunggulan wilayah dengan topografi datar dan lebih mudah untuk mengakses wilayah pemasaran baik ke Pulau Jawa, Indonesia Tengah dan Timur, maupun ke wilayah negara-negara Asia.

Gambar 2.8. Rencana Pembangunan di Provinsi Lampung



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2015

Selain membagi wilayah pembangunan dalam klaster-klaster, Pemerintah Provinsi Lampung telah merencanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik yang didanai APBD Provinsi maupun APBN. Yang kini tengah dalam pembangunan adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Bakauheni Lampung Selatan hingga perbatasan Sumatera Selatan di wilayah Kabupaten Mesuji.

BAB III

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Lampung mengacu dan merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.

Visinya adalah **“Lampung Maju dan Sejahtera 2025”**

Untuk mencapai visi dirumuskan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global;
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEK, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Visi pembangunan industri Provinsi Lampung yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Lampung yaitu:

“Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam sebagai Penopang Utama Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung”

Misinya meliputi:

1. Mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing, dan profesional;
2. Meningkatkan sektor industri menjadi sektor andalan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Lampung;
3. Memperkuat struktur industri untuk mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing berbasis SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3.2. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Lampung adalah:

1. Mengembangkan industri yang berdaya saing;
2. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Lampung;
3. Mewujudkan struktur industri berbasis SDA yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3.3. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG

Sasaran pembangunan industri Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

No.	Sasaran	Tahun			
		2020	2025	2030	2035
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	8.83	9.65	10.07	10.58
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	19,26	19,65	20,63	21,66
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Rp. juta)	2,459,737.41	2,742,972.05	2,854,347.75	2,999,948.17
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	62,992	65,761	68,431	71,922
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas				
a.	Penanaman Modal Asing (Ribu US \$)	1,355,614.05	1,541,908.05	1,620,560.90	1,686,362.17
b.	Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. juta)	4,355,294.42	4,953,816.63	5,154,961.49	5,417,916.34

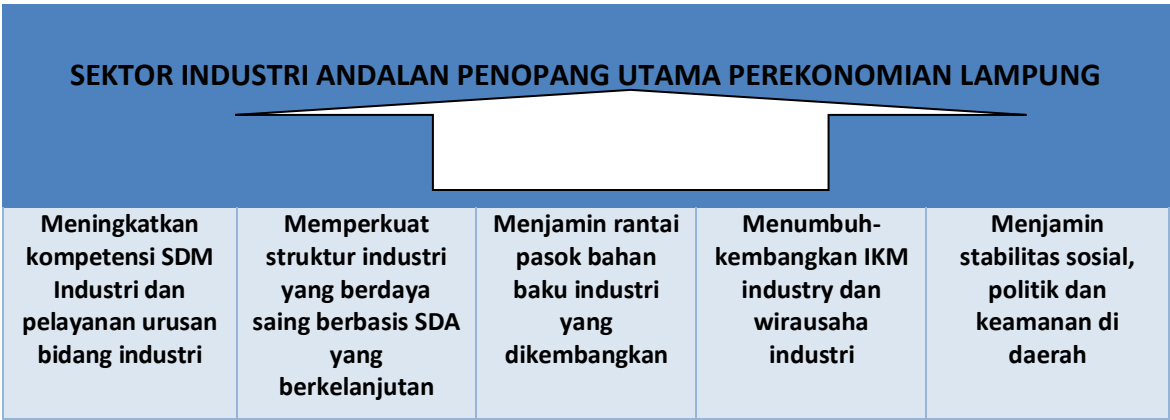
Sumber: Renstra Dinas Perindustrian Prov Lampung (data diolah)

3.4. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Strategi disusun memuat upaya yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Pencapaian tujuan pembangunan industri Provinsi Lampung digambarkan dengan peta strategis sebagai berikut:

Gambar 3.1. Peta Strategi PembangunanPerindustrian 2015-2019



Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu guna mencapai tujuannya yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM baik yang terlibat langsung dalam industri maupun SDM yang memberikan pembinaan dan fasilitasi; peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri; serta integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelayanan administrasi urusan perindustrian oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis SDA yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
3. Menjamin rantai pasok bahan baku industri yang dikembangkan.
4. Menumbuhkan kembangkan IKM industri dan wirausaha industri.
5. Menjamin stabilitas sosial, politik dan keamanan di daerah yang memberikan iklim usaha yang kondusif.

3.5. Arah Kebijakan

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan Pembangunan sektor industri di Provinsi Lampung.

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pembangunan industri Provinsi Lampung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pembangunan Industri Provinsi Lampung

Visi: Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam sebagai Penopang Utama Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung			
Misi 1: Mengembangkan sumberdaya industri yang berkualitas, berdaya saing, dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan industri yang berdaya saing	Meningkatnya sumber daya manusia industri yang berkualitas, berdaya saing, dan professional	Meningkatkan kompetensi SDM industri maupun SDM yang memberikan pembinaan dan fasilitasi; peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri; serta integrasi sistem perencanaan, regulasi perizinan, dan pelayanan administrasi urusan perindustrian, jaminan sosial politik dan keamanan	Mendorong peningkatan pendidikan formal dan non formal sdm industri
			Regulasi yang mendorong pengembangan pendukung prasarana dan sarana industri
			Menyempurnakan sistem perencanaan, regulasi perizinan, dan pelayanan administrasi urusan perindustrian
			Memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/ kota, dan kerjasama dengan lembaga sosial dan instansi kemandirian dalam memberikan kenyamanan berinvestasi
Misi 2 : Meningkatkan sektor industri menjadi sektor andalan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Lampung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Lampung	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri	Meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah terhadap produk domestik regional sektor industri	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan IKM yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar dan ekspor
		Meningkatkan daya saing industri menengah dan besar yang berorientasi ekspor	Fasilitasi pembangunan kawasan-kawasan industri yang terintegrasi khususnya di wilayah timur Provinsi Lampung

Misi 3 : Memperkuat struktur industri berbasis SDA yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing industri andalan	Meningkatnya manajemen mutu produk industri andalan yang berorientasi pasar dan ekspor	Mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah daerah/pusat.	Peningkatan pemahaman tentang regulasi bidang perindustrian dan standar kualitas produk industri
			Mendorong dan memfasilitasi terpenuhinya standarisasi mutu usaha industri dalam memenuhi tuntutan pasar
			Meningkatkan pemahaman tentang standar industri hijau

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSILAMPUNG

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.

Menentukan jenis industri andalan, pendukung dan industri hulu, adalah didasarkan pada penghitungan koefisien *location question (LQ)* terhadap potensi industri provinsi terhadap nasional, sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Nilai Koefisien LQ Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2011-2014

No	Industri Pengolahan	2011	2012	2013'	2014"	Rata-rata
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00'	0,00'	0,00'	0,00'	0,00'
2	Industri Makanan dan Minuman	2.25"	2,24"	2,36"	2,35"	2,30 "
3	Industri Pengolahan Tembakau	0,00'	0,01'	0,01 ¹	0,01'	0,01 ¹
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,00'	0,00'	0,00'	0,00'	0,00'
5	Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0'	0'	0'	0'	0'
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dan Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,33'	0,35'	0,35'	0,33'	0,34'
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,14'	0,15'	0,17'	0,17'	0,16'
8	Industri Kimia: Farmasi dan Obat Tradisional	0,77'	0,81'	0,84'	0,81'	0,81 ¹
9	Industri Karet, Barang dan Karet dan Plastik	1.95"	2.14-	2,25"	2,43"	2,19 "
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1.44"	1,52"	1,52"	1,53"	1,50 "
11	Industri Logam Dasar	0,07'	0,08'	0,07'	0,07'	0,07'
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Ootik dan Peralatan Listrik	0,06'	0,06'	0,06'	0,06'	0,06'
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	1.70"	1,66"	1,76"	0,23'	1,34 "
14	Industri Mat Angkutan	0,02'	0,02'	0,02'	0,19'	0,07'
15	Industri Furnitur	0,21'	0,22'	0,23'	0,34'	0,25'
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.11'	0,13'	0,13'	0,13'	0.12'

Sumber: Kajian Potensi Hilirasi IKM Provinsi Lampung, 2016

Keterangan : " = basis
' = Non Basis

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Lampung dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi SDM industri, sarana dan prasarana kerja, dan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelayanan administrasi urusan perindustrian;
2. Meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah terhadap produk domestik regional sektor industri;
3. Meningkatkan daya saing industri menengah dan besar yang berorientasi ekspor;
4. Mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerja sama dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Pusat.

4.2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Lampung

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ini:

1. Nilai Tambah Ekonomis melalui Peningkatan PDRB;
2. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
3. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam;
4. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar;
5. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah;
6. Dukungan Sumber Daya Manusia;
7. Prestise Daerah
8. Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat;
9. Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah;

10. Kesiapan dan Ketersediaan Pelaku Usaha

1) Nilai Tambah Ekonomis

Sektor industri pada PDRB Provinsi Lampung meskipun ekonomi global dan nasional masih mengalami penurunan namun Sektor Industri tetap menunjukkan peningkatan, baik nilai tambah, pertumbuhan, maupun kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Lampung selama periode 2010-2015, sebagaimana Gambar 2.4., Gambar 2.5., dan Gambar 2.6. pada Bab II.

2) Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Tahun 2011-2015 penyerapan tenaga kerja pada perusahaan besar dan sedang, cabang industri makanan dan minuman/tembakau/pakaian rata-rata sebesar 79.21% dari total tenaga kerja, sebagaimana pada Tabel 2.9. pada Bab II.

3) Aspek Pasar

Aspek pasar diwujudkan pada tingkat perkembangan ekspor, pemasaran Sektor Industri Provinsi Lampung juga didominasi cabang industri makanan dan minuman. Sekitar 79.29 persen dihasilkan dari cabang industri ini, sebagaimana pada Tabel 2.10 pada Bab II.

4) Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Lampung mendukung masuknya investasi di sektor industri dan akan memberikan fasilitas kepada:

1. Industri yang memanfaatkan hasil produksi pertanian masyarakat;
2. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja;
3. Industri yang mengembangkan energi terbarukan;
4. Industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;
5. Industri yang melakukan pembangunan infrastruktur;
6. Industri yang mengembangkan industri hijau;
7. Industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;

Fasilitasi yang dimaksud dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Termasuk didalamnya jaminan stabilitas sosial, politik, dan keamanan di daerah sehingga memberikan iklim investasi yang baik bagi pelaku usaha serta penumbuh kembangan kewirausahaan sebagai bagian dari rantai pasok dari industri yang dikembangkan. Provinsi dan kabupaten/kota memberikan jaminan pasokan bahan baku yang diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing.

Pemerintah memperkuat kelembagaan perizinan melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan fasilitasi di bidang industri melalui Dinas Perindustrian yang telah menjadi perangkat daerah tersendiri sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pembinaan urusan di bidang industri.

5) Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha

Kesiediaan dan kesiapan pelaku usaha terhadap pembangunan industri, khususnya industri pangan ditunjukkan dengan peningkatan investasi pada cabang usaha industri ini yang cukup tajam antara tahun 2012-2014, sebagaimana Gambar 2.6. pada Bab II.

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Program Unggulan Daerah (PUD), penentuan program unggulan daerah mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. penyerapan tenaga kerja;
- b. sumbangan terhadap perekonomian;
- c. sektor basis ekonomi daerah;
- d. dapat diperbaharui;
- e. sosial budaya;
- f. ketersediaan pasar;
- g. bahan baku;
- h. modal;
- i. sarana dan prasarana produksi;
- j. teknologi;
- k. manajemen usaha;
- l. harga;

Tabel 4.2. Skoring Penentuan Industri Andalan (Unggulan) Provinsi Lampung

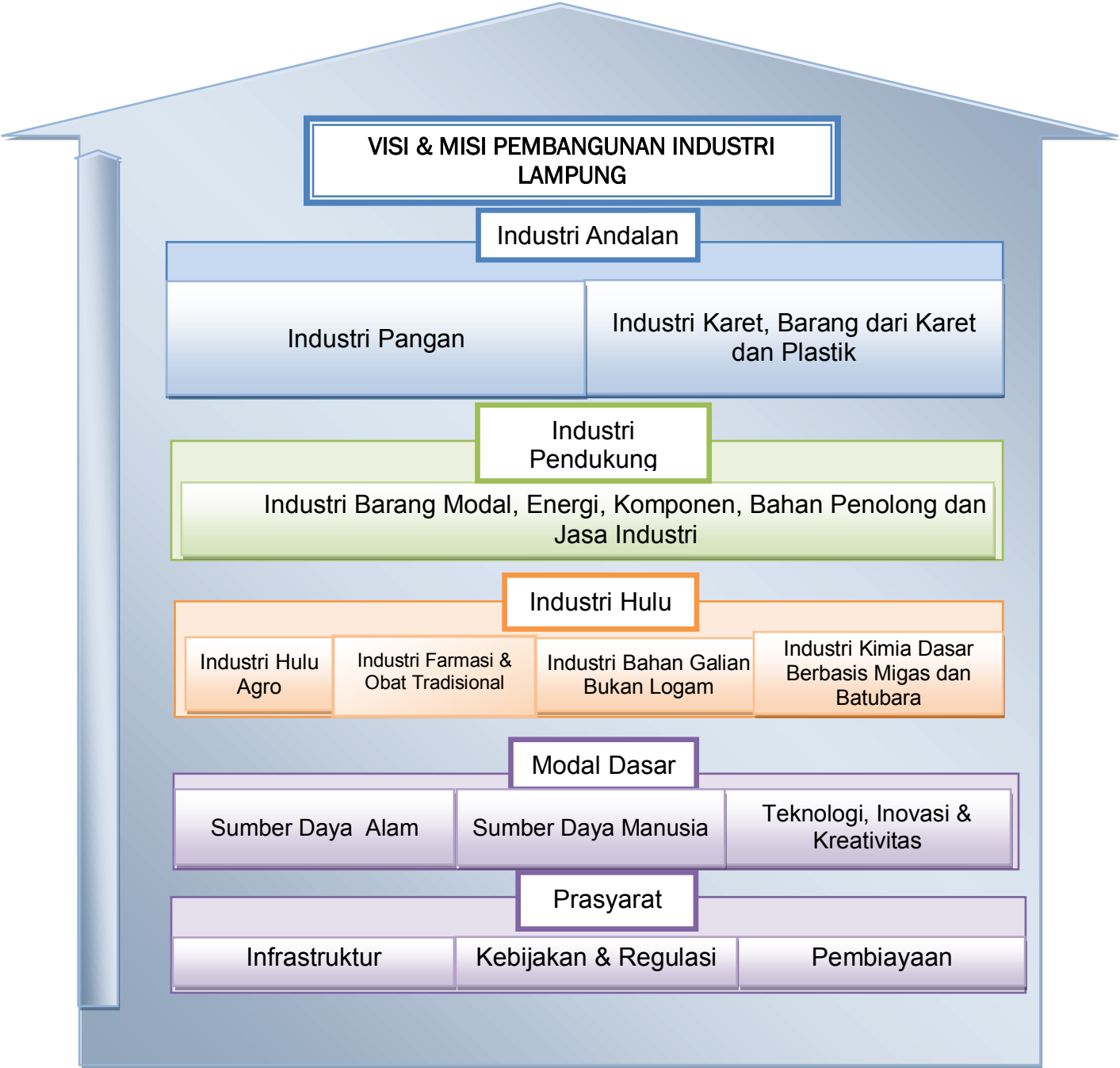
Faktor	Jenis Industri		Minyak dan Batubara	Makan & Minuman	Tembakau	Tekstil / Pakaian Jadi	Kulit/Brg dr kulit/ alas kaki	Kayu/brg dr kayu/gabus/bambu	Kertas/brg kertas/cetakan	Kimia/farmasi/obat tradisional	Karet/brg dr karet/plastik	Barang galian bukan logam	Logam dasar	Barang logam/komputer/ elektronik/ peralatan listrik	Mesin dan Perlengkapan	Alat angkutan	Furniture	Pengolahan lainnya/ jasa reparasi/ pemasangan mesin
1	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	0.09	68.76	0.06	0.06	0	1.46	0.84	7.46	10.44	6.22	0.36	0.69	2.8	0.27	0.35	0.2	
2	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan (%);	0.85	60.00	0.00	19.0 0	0.00	6.00	0.67	1.00	6.96	1.13	0.52	1.00	1.00	0.24	1.00	0.85	
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam;	1	5	1	1	1	2	2	2	4	3	2	2	2	1	3	2	
4	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar;	0.09	68.76	0.06	0.06	0	1.46	0.84	7.46	10.44	6.22	0.36	0.69	2.8	0.27	0.35	0.2	
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah;	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Faktor	Jenis Industri																
		Minyak dan Batubara	Makan & Minuman	Tembakau	Tekstil / Pakaian Jadi	Kulit/Brg dr kulit/ alas kaki	Kayu/brg dr kayu/gabus/bambu	Kertas/brg kertas/cetakan	Kimia/farmasi/obat tradisional	Karet/brg dr karet/plastik	Barang galian bukan logam	Logam dasar	Barang logam/komputer/ elektronik/ peralatan listrik	Mesin dan Perlengkapan	Alat angkutan	Furniture	Pengolahan lainnya/ jasa reparasi/ pemasangan mesin
6	Dukungan Sumber Daya Manusia;	2	5	1	2	2	3	3	2	4	2	2	2	2	1	3	2
7	Prestise Daerah	1	5	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
8	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat;	1	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah;	2	5	1	2		2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
10	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	1	5	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah	11.03	229.5 2	8.12	31.1 2	8	23.9 2	17.3 5	29.9 2	47.84	28.5 7	15.2 4	16.3 8	20.6	12.7 8	17.7	15.2 5

4.2.2. Bangun Industri Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan skoring di atas tersebut, maka untuk sektor industri ditetapkan Industri Unggulan (Andalan) Provinsi Lampung sebagaimana dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1. Bangun Industri Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2035



4.3. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan didukung oleh ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan sehingga proses produksi industri dapat berjalan secara kontinue.

Tabel 4.3. Peta Potensi Bahan Baku Industri Pangan dan Agro Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	Potensi bahan baku (Produksi/Jumlah)							
		Ikan (ton)	Tebu (ton)	Karet (ton)	Kelapa sawit (ton)	Kakao (ton)	Tanaman Kayu Akasia (buah)	Usaha Tanaman Herbal (buah)	Kelapa (ton)
1	Kab, Lampung Barat	4,337	-	19	71	802	24,27	207	281
2	Kab, Lampung Selatan	4,619	-	1,650	6,671	3,265	317,899	87	32,183
3	Kab, Lampung Tengah	9,194	22,341	1,167	29,180	3,167	1,715,186	312	12,209
4	Kab, Lampung Timur	9,273	-	1,149	3,470	5,561	2,527,195	229	19,156
5	Kab, Lampung Utara	1,359	24,980	9,801	16,124	1,404	41,508	177	1,897
6	Kab, Tanggamus	2,21	-	25	-	6,371	34,604	189	16,67
7	Kab, Tulang Bawang	6,673	2,681	9,065	21,059	132	1,356,779	42	1,017
8	Kab, Way Kanan	1,319	25,122	15,873	13,012	782	134,612	42	4,243
9	Kab, Pesawaran	1,896	-	276	1,561	1,561	70,348	57	11,38
10	Kab, Pringsewu	4,727	-	55	754	754	82,668	62	3,761
11	Kab, Mesuji	808	-	7,124	59,105	156	763,994	21	780
12	Kab, Tulang Bawang Barat	958	-	5,812	12,150	86	526,573	15	1,115
13	Kab, Pesisir Barat	-	-	19	8,791	919	-		4,52
14	Kota Bandar lampung	290	-	15	24	286	64,154	389	175

Sumber: LDA, BPS 2015

Berdasarkan penilaian potensi serta didukung potensi bahan baku, pembangunan industri di Provinsi Lampung ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan seperti ditunjukkan pada Table 4.4

Tabel 4.4. Industri Andalan (Unggulan) Provinsi Lampung

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2016-2025	2025-2035
1	Industri Pangan	1. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian/Peternakan	
		- Beras Premium	- Buah-buahan dalam kaleng
		- Buah-buahan segar	- Sayuran dalam kaleng
		- Ayam buras	- Daging dalam kaleng (corned)
		- Daging sapi beku	
		2. Industri Berbahan Baku Ikan dan Hasil Kelautan	
		- Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i>	- Minyak Omega 3
		- Rumput laut segar	- Pangan fungsional berbasis limbah industr hasil laut
		- Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)	- Ikan dalam kaleng (sardens)
			- Tepung Ikan
		3. Industri Olahan Coklat	
		- Bubuk coklat, Lemak coklat, Makanan dan minuman dari coklat	- <i>High value chocolate</i>
		- Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	
		4. Industri Olahan Kopi	
		- Kopi Bubuk, kopi instan, kopi mix, Kopi dekafeinasi	- Aneka pangan olahan berbasis kopi organik (decaffeined doffee, kopi

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2016-2025	2025-2035
		- Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi	mix, kopi celup, dll)
		5. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran	
		- Buah/sayuran dalam kaleng	-
		- Fruit/vegetable layer	
		- Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah	
		- Aneka olahan dari buah-buahan (juice, jelly, syrop)	
		6. Industri Pengolahan Minyak Nabati	
		- Minyak goreng (kelapa, kelapa sawit)	- Minyak sawit merah
		- CPO - CPKO	- <i>Fortified Cooking oil</i>
		- Santan dalam kemasan	- Minyak cengkeh
			- Minyak atsiri
			- Minyak lada
			- Minyak kayu manis
		7. Industri Olahan Lada	
		- Lada bubuk	- Minyak lada
		- Lada segar dalam kaleng	
		8. Industri Minuman	9. Industri Minuman
		- Minuman ringan	- Minuman ringan
		- AMDK	- AMDK
		10. Industri Tepung	
		- Tapioka	- Pati dari biomasa limbah pertanian
		- Pati lainnya (jagung, mocaf)	- Pangan darurat
		11. Industri Gula Berbasis Tebu	
		- Gula pasir	- MSG
		- Gula Cair	- Asam asetat
2	Industri Karet, Barang dari karet, plastik dan barang dari plastik	1. Industri Karet Alam dan Sintetik	
		- Lateks	- <i>Engineering natural rubber compound</i>
		- <i>Crumb Rubber</i>	
		- Busa karet	- Industri ban kendaraan bermotor dan kendaraan konstruksi/berat
		2. Industri Berbahan Plastik	
		- Plastik untuk keperluan umum	- Plastik keperluan khusus
3	Industri Hulu Agro	1. Industri Oleofood	
		- Margarin	- Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit
			- Asam organik dari limbah industri tebu (gula)
		2. Industri Gula	
		- Gula Pasir	
		- Tetes Gula	
		3. <i>Monosodium Glutamat</i>	
		- MSG	
		4. Industri Oleokimia	
		- Asam lemak nabati	- Plastik bio berbasis limbah industri sawit
		- Minyak atsiri/lada	- Polimer turunan minyak sawit
			- <i>Specialty fats</i> bahan tambahan pangan
			- Asam Sitrat

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2016-2025	2025-2035
		-	<i>Sodium Cyclamate</i>
		5. Industri Olahan Cengkeh	
		- Industri Farmasi (bahan baku antiseptik dan analgesik, bahan baku balsem, obat sakit gigi)	- Industri makanan, minuman dan rokok (bahan aditif pada minuman non alkohol, es krim, permen karet)
			- Industri kemasan aktif sebagai anti mikroba
		6. Industri Olahan Kayu Manis	
		- Minyak kayu manis	- Oleoresin
		- Bubuk kayu manis	
		7. Industri Olahan Kelapa Sawit	
		- Industri margarine	- Industri margarine
		- Olein	- Olein
		8. Industri Kemurgi	
		- Biodiesel	- Biogas dari palm oil mill effluent (POME)
		- Bioetanol	- Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa
		-	
		9. Industri Pakan	
		- Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture	- Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture
4	Industri Farmasi dan Obat Tradisional	1. Industri Farmasi dan Kosmetika	
		- Sediaan Herbal	- Simplisia
		- Produk Herbal / Natural	- Ekstrak
		- Bahan Baku tambahan pembuatan obat (excipient)	- Sediaan farmasi
		2. Industri Kesehatan	
		- Hospital furniture	- Hospital furniture
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Bambu	1. Industri Berbasis Kayu dan Bambu	
		- Pulp	- Aneka kertas
		- <i>Particle board</i>	- Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan kayu
		- Kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu	- <i>High value</i> kerajinan dan furniture
		- Furniture kayu, bambu dan rotan	
6	Industri Migas dan Batubara	1. Industri Migas	
		- Industri Petro kimia (metanol, etilen, propilen, butadien)	- Industri Kimia Organik
			- Industri Plastik Kemasan
			- Industri Pupuk
		2. Industri Batubara	
		- Bahan bakar	- Pembangkit listrik
			- Bahan baku industri petrokimia (etilen, propilen)
			- Amonia
7	Industri Logam	1. Industri Besi	
		-	- Industri Besi dan Baja Hulu (<i>sponge iron</i> dan <i>iron pellet</i>)
8	Industri Bahan Galian Bukan Logam	1. Industri Keramik	
		- Keramik untuk <i>table ware</i>	-
		2. Industri Kaca	
		- Botol dan vial kaca untuk farmasi	- Kaca spion kendaraan

4.4. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Lampung

Penetapan industri unggulan Provinsi Lampung memiliki sasaran yaitu peningkatan nilai tambah (*value added*), nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan investasi.

A. Industri Pangan

Industri Pangan di Provinsi Lampung adalah Industri Makanan dan Minuman yang mendominasi kontribusi terhadap nilai dan volume sektor Industri. Karena industri kelompok ini terus didorong dengan proyeksi kira-kira sebagaimana Tabel 4.5

Tabel 4.5. Sasaran Pembangunan Industri PanganTahun 2020 – 2035					
No.	Sasaran	Tahun			
		2020	2025	2030	2035
1	Nilai tambah (Rp juta)	34.686.113,41	48.649.068,39	68.232.835,07	95.700.080,92
2	Pertumbuhan (%)	8,35	8,77	9,22	9,69
3	Nilai ekspor (Rp juta)	471.877,90	602.249,10	768.639,40	981.000,30
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	50.394	52.609	54.745	57.538
5	Nilai Investasi (Rp juta)	2.510.781,00	4.185.280,21	7.052.440,55	11.883.772,47

Upaya penetapan industri unggulan adalah dalam upaya pencapaian sasaran pertumbuhan sektor industri tanpa migas hingga akhir tahun 2019 dapat mencapai sekitar 8.35% dan sampai tahun 2035 diproyeksikan sebesar 9,69%. Untuk mencapai sasaran tersebut disusun program sebagaimana Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Program Pengembangan Industri PanganTahun 2020 – 2035		
No	PERIODE 2015-2025	PERIODE 2026-2035
1	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	Memantapkan zonasi/kawasan industri-industri;
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan bekerjasama dengan lembaga penyedia jasa dan perguruan tinggi
3	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri

No	PERIODE 2015-2025	PERIODE 2026-2035
	yang terintegrasi dan perguruan tinggi;	pangan
4	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i> , <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> , sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangandan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;
5	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;	Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.
6	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah	
7	Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan didalam dan luar negeri	

B. Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik

Sama halnya dengan dengan Industri Pangan, industri unggulan kedua adalah Industri Karet/barang dari karet dan Plastik juga terus didorong sesuai dengan sasaran sebagaimana Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Sasaran Pembangunan Industri Karet/Barang dari Karet/ Plastik 2020-2035

No.	Sasaran	Tahun			
		2020	2025	2030	2035
1	Nilai tambah (Rp juta)	3.351.963,30	4.458.111,19	5.929.287,88	7.885.952,88
2	Pertumbuhan (%)	7,80	7,80	7,80	8,00
3	Nilai ekspor (Rp juta)	45.119	48.728	52.626	56.837
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	6.299	6.576	6.843	7.192
5	Nilai Investasi (Rp juta)	27.544	56.057	39.298	41.228

Untuk mencapai sasaran di atas, disusun program pengembangan industri karet/barang dari karet dan plastik sebagaimana Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Program Pengembangan Industri Karet/Barang dari Karet/Plastik2020-2035

No	PERIODE 2015-2025	PERIODE 2026-2035
1	Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum;	Mendorong berdirinya industri nasional untuk memproduksi barang berbahan dasar karet;

No	PERIODE 2015-2025	PERIODE 2026-2035
2	Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet	Memperkuat industri pembuat kompon plastik dan karet
3	Memfasilitasi untuk memproduksi peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir;	Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet skala besar dengan orientasi ekspor
4	Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah;	
5	Memperkuat infra struktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib;	
6	Meningkatkan kompetensi SDM	

Penyiapan Industri Hulu Agro dimulai dari upaya perluasan dan produktivitas bahan baku khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan. Dengan perluasan dan peningkatan produktivitas bertujuan menjaga rantai pasok sehingga proses produksi pada industri dapat terus berlangsung. Program-programnya tercermin pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Program Pengembangan Industri Hulu Agro 2020-2035

No	PERIODE 2015-2025	PERIODE 2026-2035
1	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas,kuantitas dan kontinuitas)melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;	Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien;
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;	Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (<i>lowcost technology</i>) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar;
3	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
4	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP,GMP, sertifikasi SNI danindustri hijau dan peningkatan kapasitaslaboratorium uji mutu;	Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai
5	Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;	Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan;

No	PERIODE 2015-2025	PERIODE 2026-2035
6	Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan didalam dan luar negeri;	Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan;
7	Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME(<i>Palm Oil Mill Effluent</i>) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri <i>pulp</i> dan kertas	Memberikan fasilitas pembangunan industri bioenergi berbasis pirolisis gasifikasi biomassa (termasuk limbah industri), dan biokonversi bahan lignoselulosa, sertabiomaterial (<i>building block</i>) dari <i>lignin</i> .

4.5. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 4.10. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016 – 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
A	Pengembangan WPPI		
1	Lampung Barat	Studi Kelayakan dan Master plan	Pemantapan Zonasi
2	Lampung Tengah	Masterplan	Pemantapan Zonasi
3	Lampung Selatan	Studi Kelayakan dan Master plan	Pemantapan Zonasi
4	Lampung Timur	Studi Kelayakan dan Master plan	Pemantapan Zonasi
5	Tanggamus	Pembangunan dan Pengembangan	Pembangunan dan Pengembangan
6	Mesuji	Studi Kelayakan dan Master plan	Pemantapan Zonasi
7	Tulang Bawang	Studi Kelayakan dan Master plan	Pemantapan Zonasi
B	Pengembangan KPI		
1	Bandar Lampung:	Eksisting	Pengembangan
	a. Ketapang dan Way Lunik (Tebet Selatan);		
	b. Campang Raya (Tj. Krg Timur);		
	c. Srengsem, Karang Maritim, Panjang Utara, dan Panjang Selatan (Kec. Panjang)		
	Kawasan Pergudangan:		
	a. Way Lunik		
	b. Ketapang		
	c. Garuntang		
	d. Bumi Waras		
	e. Jl. Ir Sutami		
	f. Jl. Tirtayasa		
	g. Jl. Soekarno-Hatta		
	h. Jl. Yos Sudarso		

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
2	Lampung Selatan: a. Tanjung Bintang; b. Ketapang; c. Bakauheni ; d. Katibung; e. Sepanjang Jalan Koridor Lintas Timur f. Natar; g. Sidomulyo; h. Palas i. Penengahan	Eksisting	Pengembangan
3	Lampung Tengah: a. Terbanggi Besar b. Terusan Nunyai c. Way Pengubuan d. Bumi Ratu Nuban e. Anak Tuha (Sulusuban) f. Koridor Jalan Lintas Timur (Seputih Banyak, Way Seputih, dan Bandar Mataram g. Kalirejo h. Kota Gajah i. Gunung Sugih j. Padang Ratu k. Bangun Rejo l. Seputih Raman m. Seputih Surabaya n. Seputih Banyak	Eksisting	Pengembangan
4	Lampung Timur: a. Bandar Sri Bawono b. Sekampung Udik c. Pekalongan d. Batanghari Nuban e. Mataram Baru f. Labuhan Ratu g. Marga Sekampung h. Waway Karya	Eksisting	Pengembangan
5	Lampung Utara: a. Abung Selatan b. Abung Timur c. Sungkai Utara d. Bunga Mayang e. Sungkai Selatan f. Abung Tengah g. Muara Sungkai	Eksisting	Pengembangan
6	Tanggamus a. Kawasan Industri Maritim (KIM): Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak b. Gisting; c. Talang Padang d. Kota Agung Barat e. Sumber Rejo f. Wonosobo g. Semaka h. Pematang Sawa	Eksisting	Pengembangan
7	Tulang Bawang a. Dente Teladas b. Menggala c. Menggala Timur d. Rawa Jitu Timur e. Rawa Jitu Selatan	Eksisting	Pengembangan

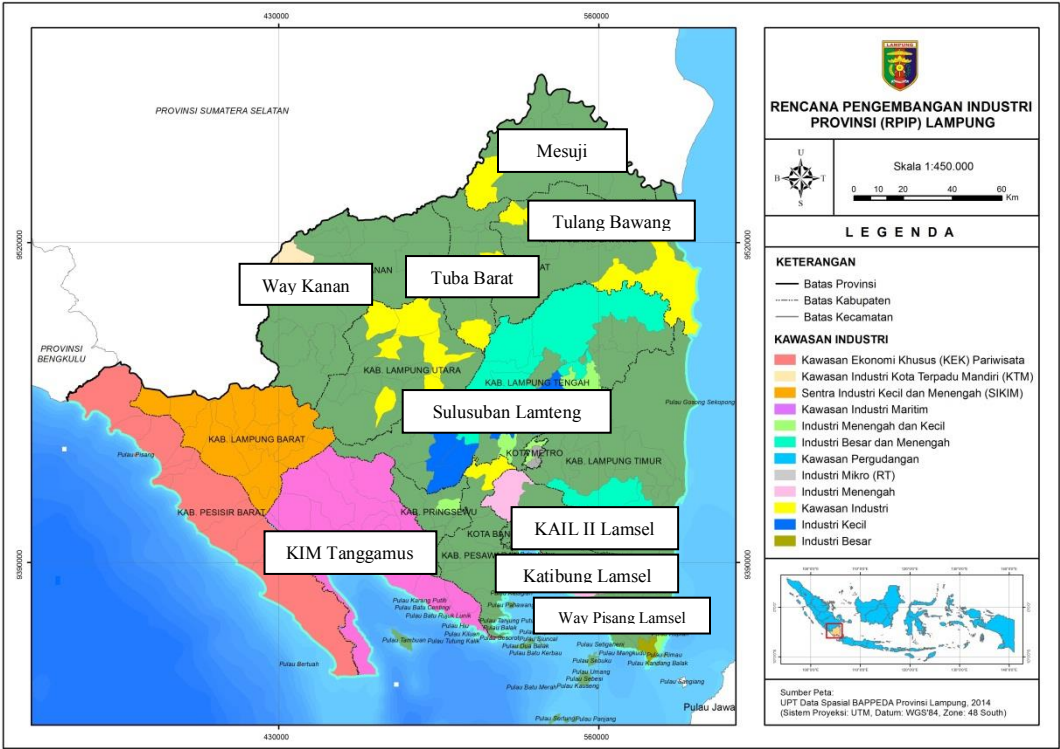
No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
	f. Gedong Meneng		
	g. Banjar Agung		
	h. Banjar Margo		
8	Way Kanan a. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kec. Way Tuba; b. Bahuga; dan c. Buay Bahuga	Eksisting	Pengembangan
9	Lampung Barat: a. Sepanjang Jalan Lintas Bukit Kemuning-Liwa		
10	Mesuji: a. Way Serdang b. Rawa Jitu Utara c. Simpang Pematang d. Tanjung Raya; e. Mesuji	Eksisting	Pengembangan
11	Metro a. Metro Utara b. Metro Barat	Eksisting	Pengembangan
12	Pesawaran a. Tegineneng b. Padang Cermin c. Gedong Tataan	Eksisting	Pengembangan
13	Pringsewu: a. Sukoharjo b. Adiluwih c. Pagelaran d. Banyumas e. Gadingrejo	Eksisting	Pengembangan
14	Tulang Bawang Barat: a. Pagar Dewa b. Tulang Bawang Udik c. Tulang Bawang Tengah d. Tumijajar	Eksisting	Pengembangan
15	Pesisir Barat: a. Sepanjang Jalan Lintas Barat	Eksisting	Pengembangan
C Pembangunan KI			
1	Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus	Kegiatan Pengembangan/ Pembangunan	Kegiatan Pengembangan/ Pembangunan
2	Kawasan Industri Way Pisang. Lamsel	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
3	Kawasan Industri Mesuji	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
4	Kawasan Industri Lamteng (Sulusuban)	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
5	Kawasan Industri Way Kanan	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
6	Kawasan Industri Tulang Bawang Barat	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
7	Kawasan Industri Tulang Bawang	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
8	Kawasan Industri Lampung (KAIL II)	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi
9	Kawasan Industri Katibung, Lampung Selatan	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan Zonasi

D Pengembangan Sentra IKM			
1	Pringsewu	DED	Pembangunan
2	Lampung Barat	DED	Pembangunan
3	Way Kanan	DED	Pembangunan
4	Pesisir Barat	DED	Pembangunan
5	Lampung Utara	Rencana	Pembangunan
6	Lampung Tengah	Rencana	Pembangunan
7	Lampung Selatan	Rencana	Pembangunan
8	Lampung Timur	Rencana	Pembangunan
9	Tanggamus	Rencana	Pembangunan
10	Pesawaran	Rencana	Pembangunan
11	Tulang Bawang	Rencana	Pembangunan
12	Tulang Bawang Barat	Rencana	Pembangunan
13	Mesuji	Rencana	Pembangunan
14	Bandar Lampung	Rencana	Pembangunan
15	Metro	Rencana	Pembangunan

Sumber: RTRW Kab/Kota se-Provinsi Lampung

Wilayah Pengembangan Kawasan IndustriProvinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. Wilayah Pengembangan Kawasan Industri Lampung



Kawasan Industri yang telah beroperasi di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 hektare. Sedangkan kawasan-kawasan peruntukan industri tersebar pada setiap kabupaten/kota di provinsi Lampung sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, meliputi:

A. Kota Bandar Lampung

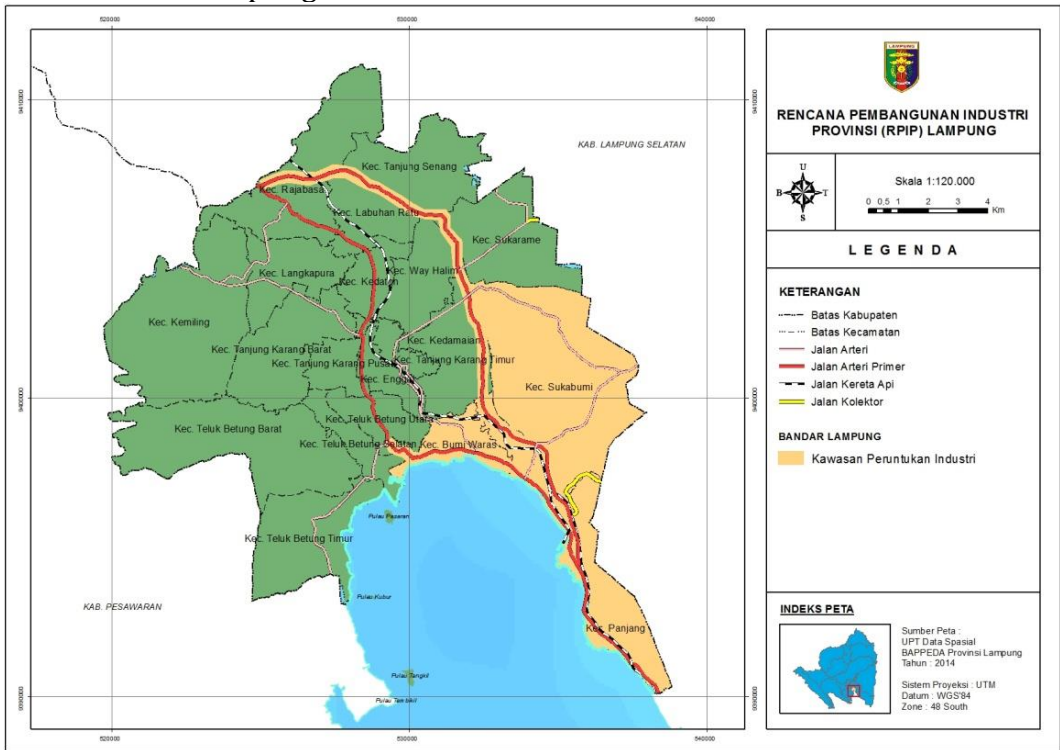
Kawasan Peruntukan Industri di Kota Bandar Lampung meliputi wilayah:

- 1. Ketapang dan Way Lunik (Teluk Betung Selatan)
- 2. Campang Raya (Tanjung Karang Timur)
- 3. Srengsem, Karang Maritim, Panjang Utara, dan Panjang Selatan (Panjang)

Sedangkan Kawasan Pergudangan berlokasi di wilayah:

- 1. Way Lunik dan Ketapang (Teluk Betung Selatan)
- 2. Garuntang;
- 3. Bumi Waras;
- 4. Jl. Ir. Sutami;
- 5. Jl. Tirtayasa;
- 6. Jl. Soekarno-Hatta; dan
- 7. Jl. Yos Sudarso

Gambar 4.3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Bandar Lampung



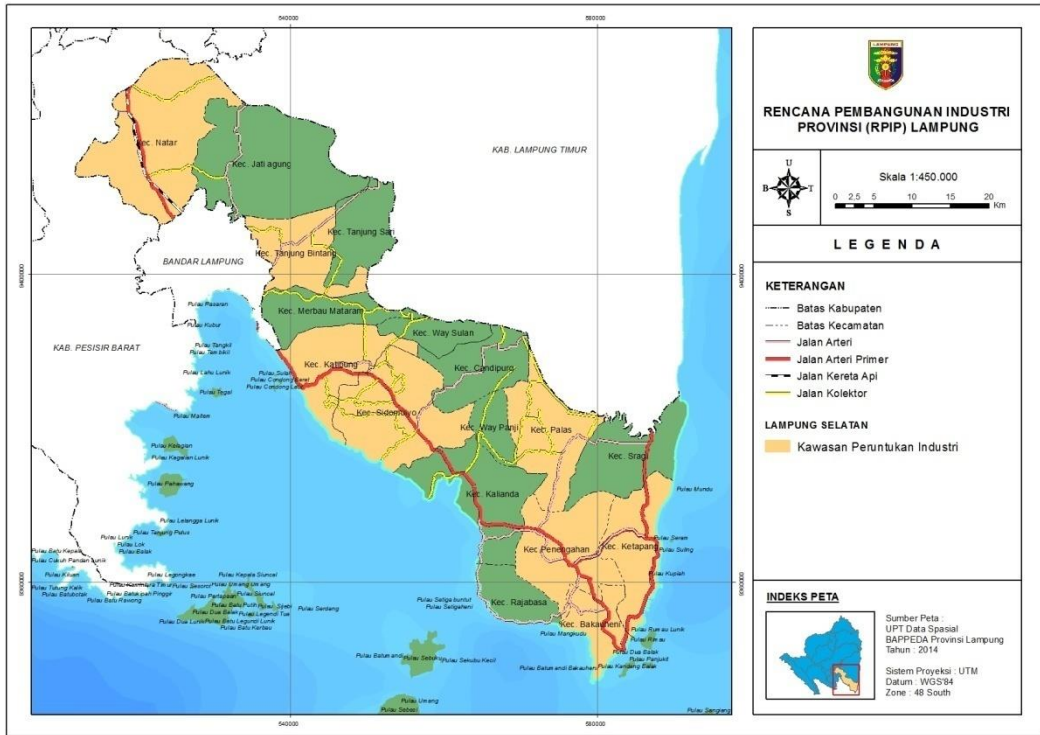
B. Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang sangat berpotensi untuk pembangunan Kawasan Industri karena posisinya yang strategis. Dan Kawasan Industri Lampung di Provinsi Lampung yang telah beroperasi berlokasi di kabupaten ini.

Dalam RTRW Kabupaten Lampung Selatan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

- 1. Tanjung Bintang;
- 2. Ketapang;
- 3. Bakauheni ;
- 4. Katibung;
- 5. Sepanjang Jalan Koridor Lintas Timur
- 6. Natar;
- 7. Sidomulyo;
- 8. Palas
- 9. Penengahan

Gambar 4.4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan

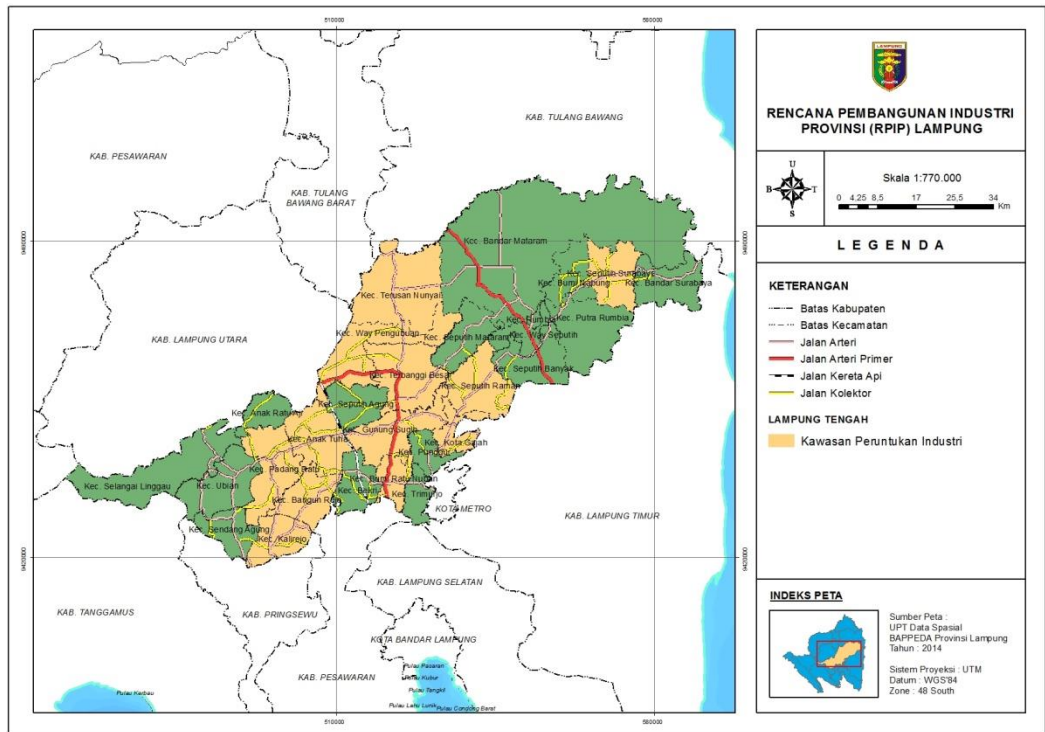


C. Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi lokasi beroperasinya industri-industri besar di Provinsi Lampung. Kawasan Peruntukan Industri di Lampung Tengah meliputi wilayah:

- 1. Terbanggi Besar;
- 2. Terusan Nunyai;
- 3. Way Pengubuan;
- 4. Anak Tuha (Sulusuban);
- 5. Koridor Lintas Timur (Seputih Banyak, Way Seputih, dan Bandar Mataram)
- 6. Kalirejo
- 7. Kota Gajah;
- 8. Bumi Ratu Nuban;
- 9. Gunung Sugih;
- 10. Padang Ratu;
- 11. Bangun Rejo;
- 12. Seputih Raman; dan
- 13. Seputih Surabaya

Gambar 4.5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Tengah

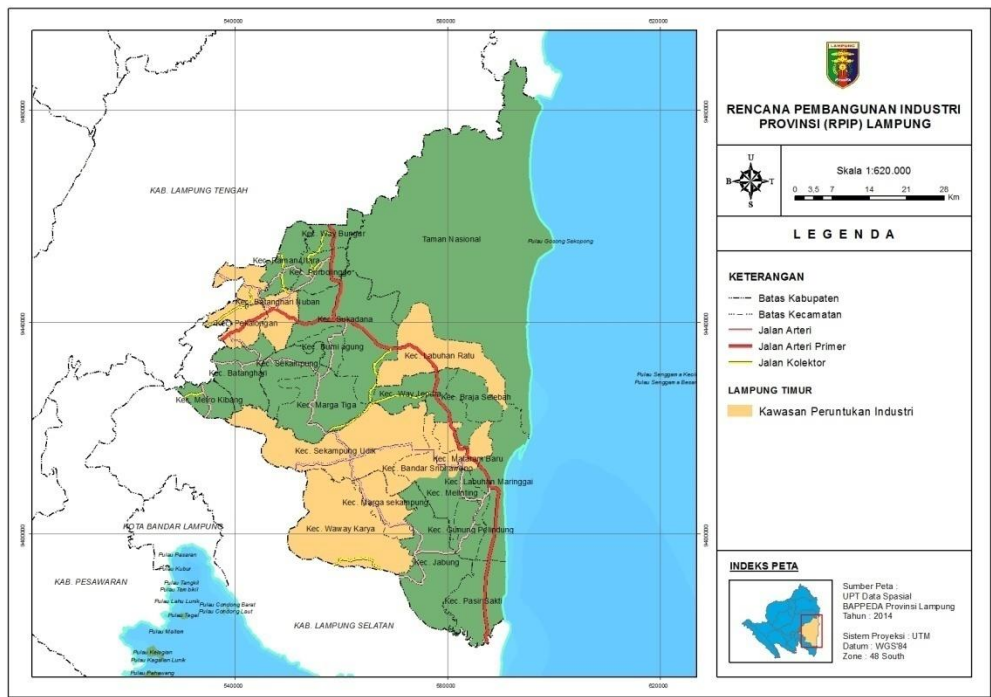


D. Kabupaten Lampung Timur

Untuk Kabupaten Lampung Timur, kawasan peruntukan industri berlokasi di wilayah:

- 1. Bandar Sribhawono;
- 2. Sekampung Udik
- 3. Pekalongan,
- 4. Batanghari Nuban,
- 5. Mataram Baru,
- 6. Labuhan Ratu,
- 7. Marga Sekampung, dan
- 8. Waway Karya.

Gambar 4.6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Timur



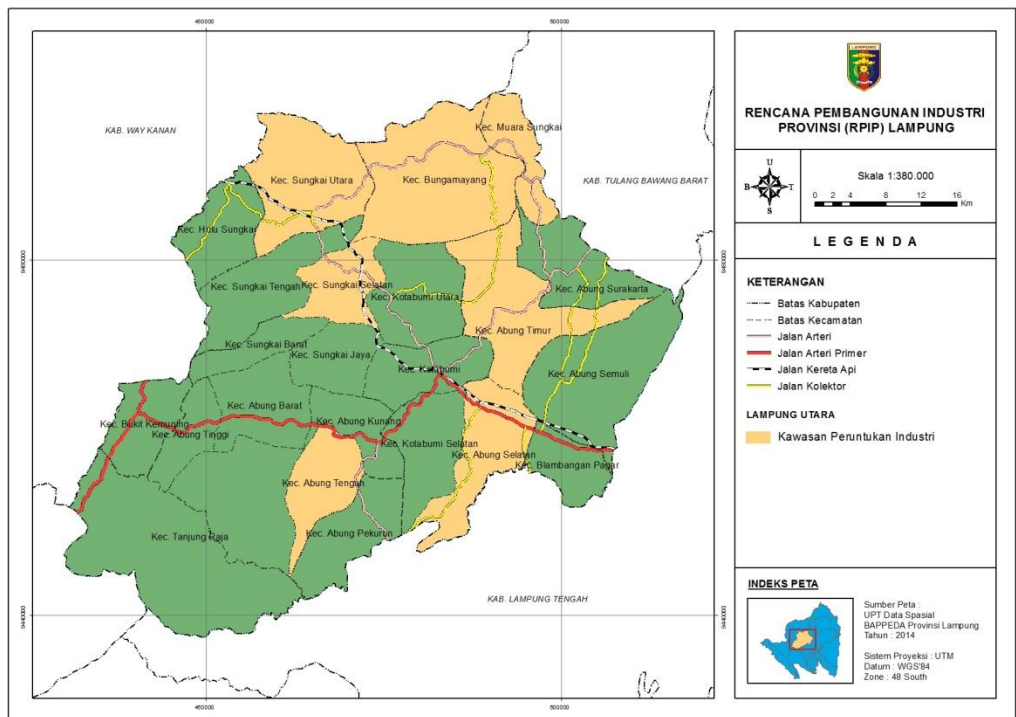
E. Kabupaten Lampung Utara

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lampung Utara terletak di wilayah Kecamatan:

- 1. Abung Selatan,
- 2. Abung Timur,
- 3. Sungkai Utara,
- 4. Bunga Mayang,
- 5. Sungkai Selatan dan
- 6. Muara Sungkai.

Wilayah Sungkai Utara, Bunga Mayang, Sungkai Selatan dan Muara Sungkai selama ini telah menjadi lokasi industri menengah dan besar seperti Pabrik Gula Bunga Mayang dan pabrik tepung tapioca.

Gambar 4.7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Utara



F. Kabupaten Tanggamus

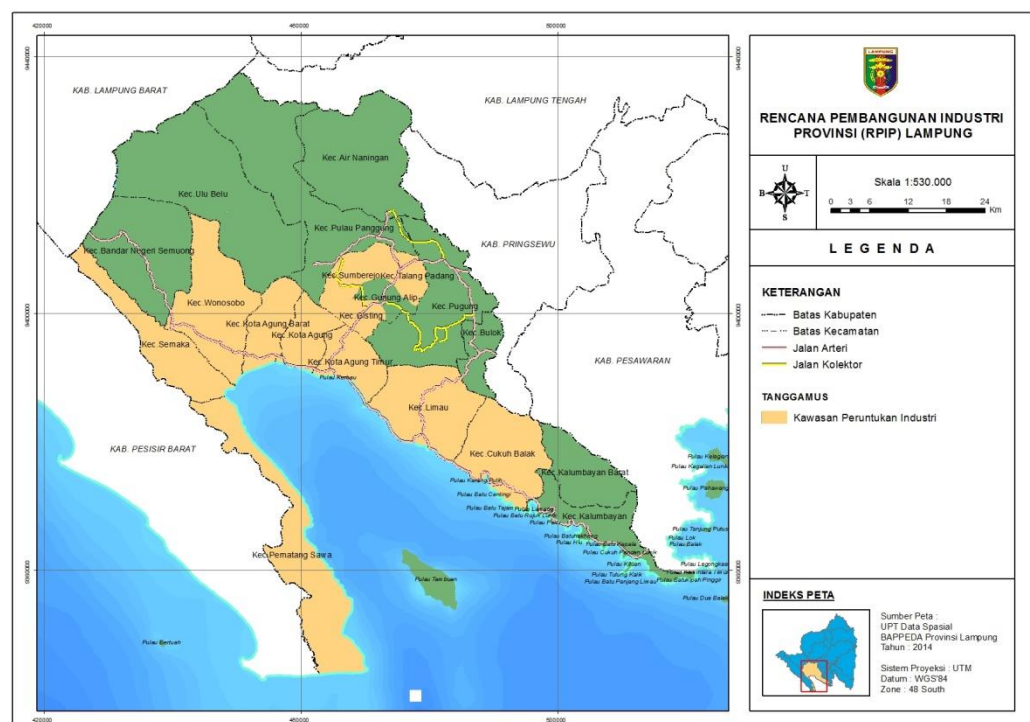
Di dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2014-2015 telah menetapkan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus masuk dalam skala prioritas nasional. Industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di wilayah:

1. Teluk Semangka Kecamatan Kota Agung Timur,
2. Limau dan
3. Cukuh Balak.

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tanggamus meliputi kecamatan:

1. Gisting,
2. Talang Padang,
3. Kota Agung Timur,
4. Kota Agung Barat,
5. Kota Agung,
6. Sumber Rejo,
7. Wonosobo, Semaka dan
8. Pematang Sawa.

Gambar 4.8. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tanggamus

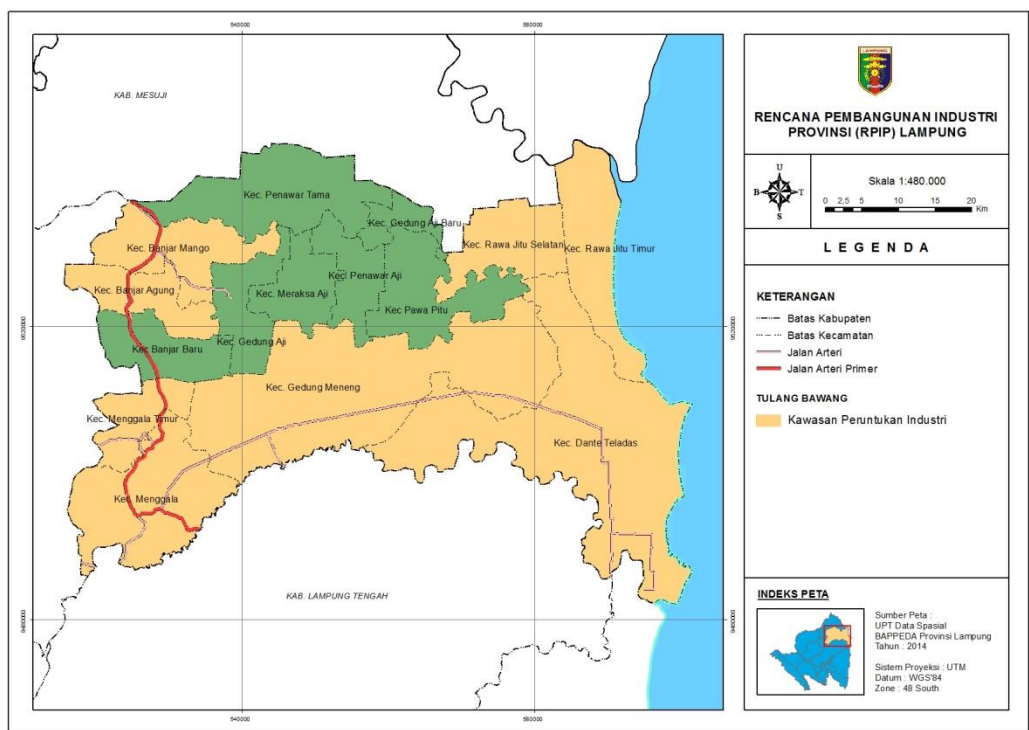


G. Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang merupakan wilayah tempat banyak beroperasinya industri terutama berbasis agroindustri. Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan:

- 1. Dente Teladas;
- 2. Gedung Meneng;
- 3. Menggala;
- 4. Menggala Timur;
- 5. Rawa Jitu Selatan;
- 6. Rawa Jitu Timur;
- 7. Banjar Agung; dan
- 8. Banjar Margo

Gambar 4.9. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tulang Bawang

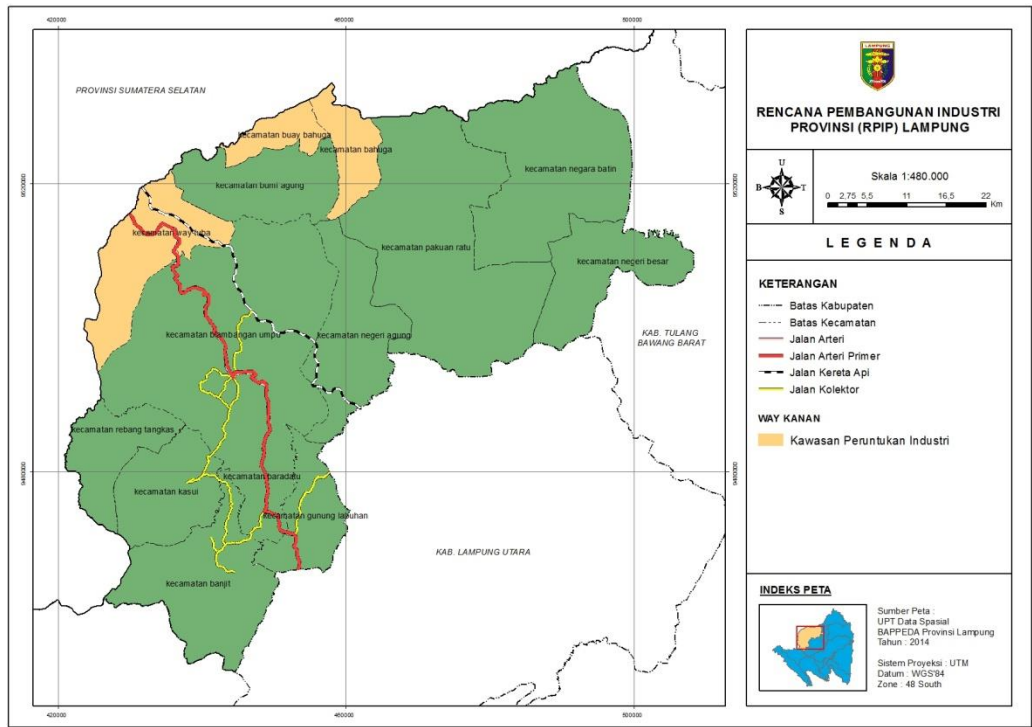


H. Kabupaten Way Kanan

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Way Kanan di fokuskan di wilayah:

- 1. Kawasan Industri Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Way Tuba,
- 2. Kecamatan Buay Bahuga dan
- 3. Kecamatan Bahuga.

Gambar 4.10. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Way Kanan

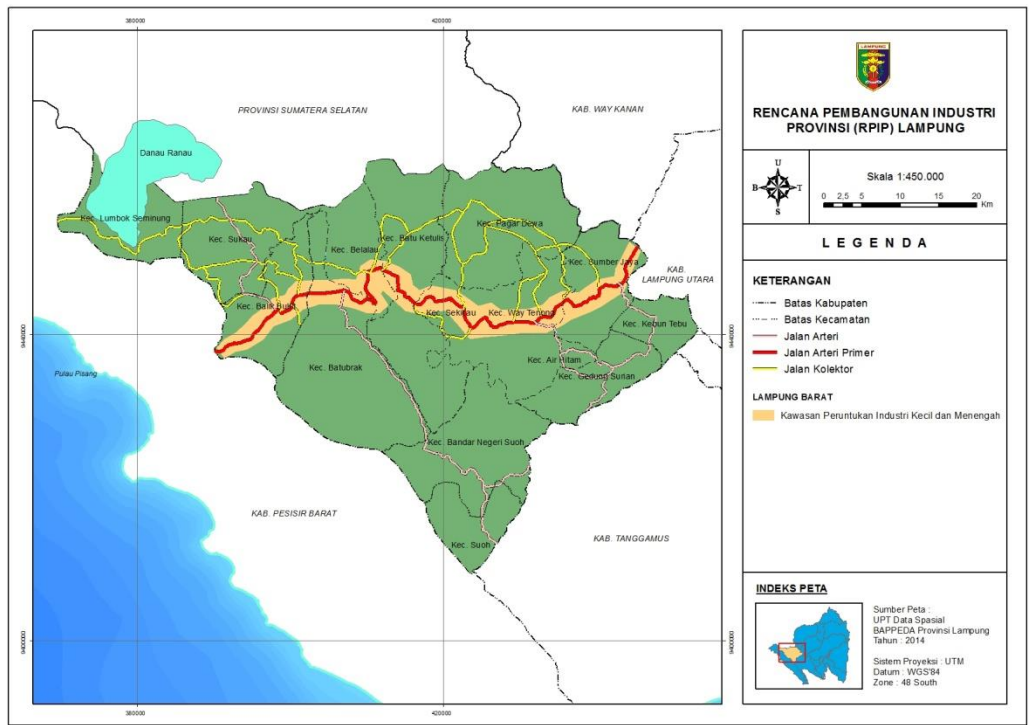


I. Kabupaten Lampung Barat

Perindustrian di Kabupaten Lampung Barat diarahkan pada industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat dalam skala industri kecil dan menengah lokasinya sepanjang Jalan Lintas Bukit Kemuning (LU)-Liwa (Lambar).

Pengembangan industri hasil pertanian, perkebunan terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Lampung Barat.

Gambar 4.11. Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Kabupaten Lampung Barat

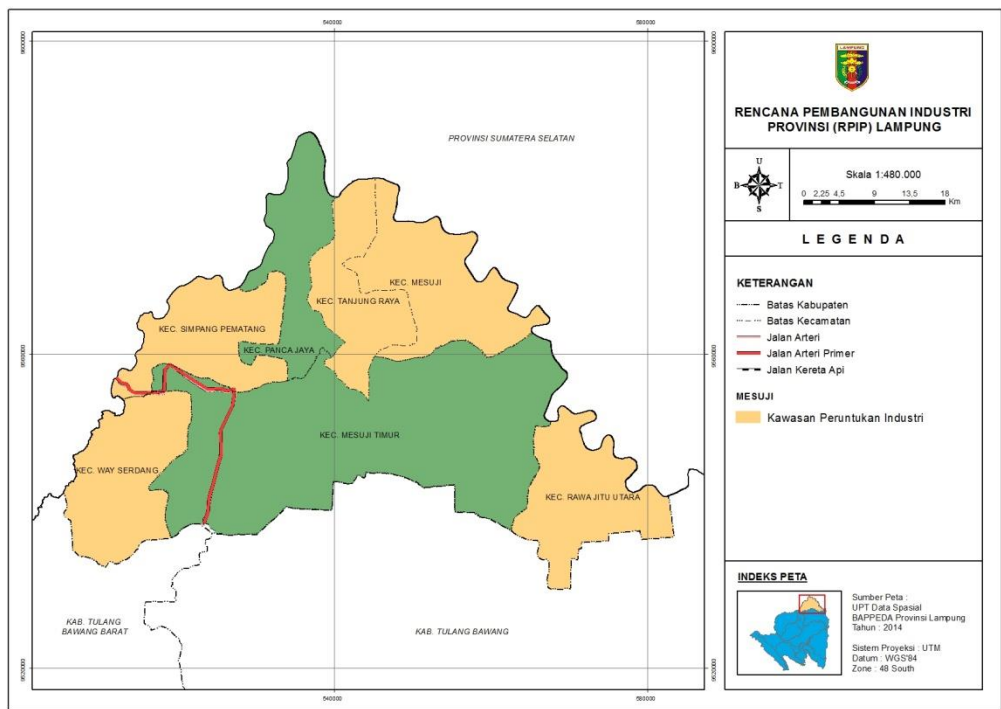


J. Kabupaten Mesuji

Kawasan peruntukan industri besar di Kabupaten Mesuji meliputi kecamatan:

- 1. Rawa Jitu Utara;
- 2. Way Serdang,
- 3. Simpang Pematang,
- 4. Tanjung Raya, dan
- 5. Mesuji.

Gambar 4.12. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Mesuji

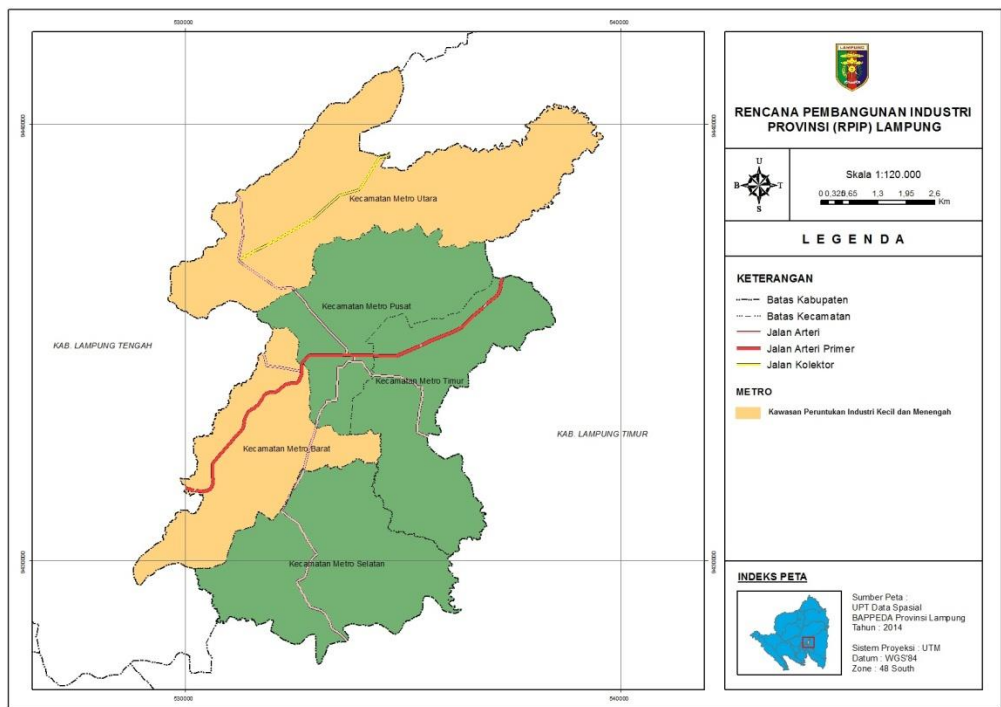


K. Kota Metro

Untuk Kota Metro yang tidak memiliki wilayah yang terlalu luas dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1. Kecamatan Metro Utara
- 2. Kecamatan Metro Barat

Gambar 4.13. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kota Metro

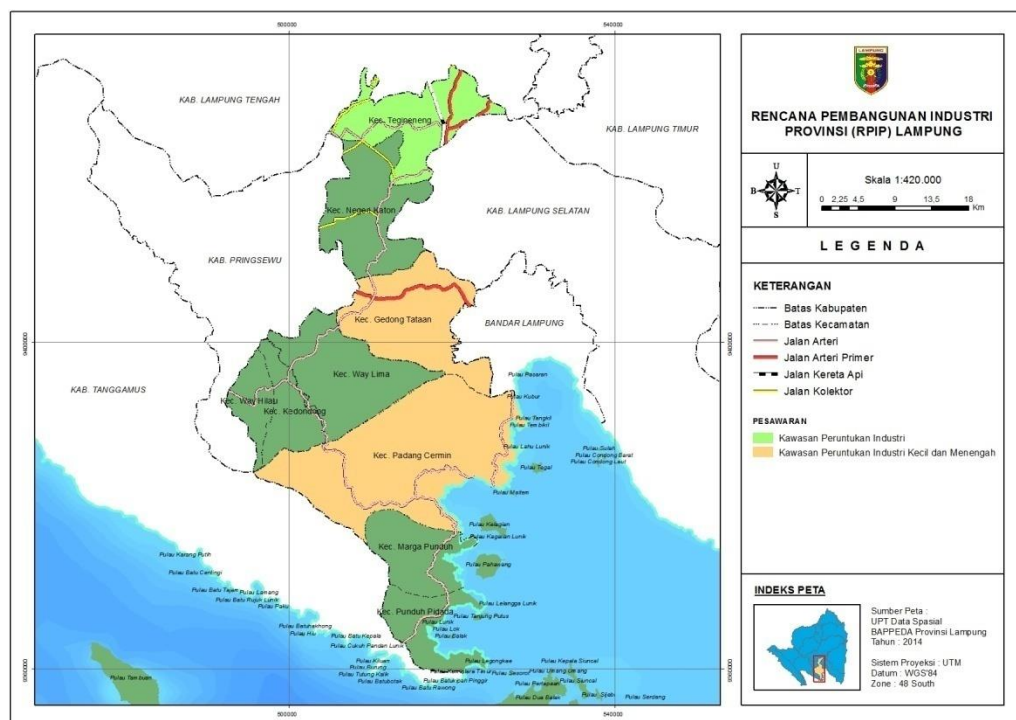


L. Kabupaten Pesawaran

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Pesawaran meliputi kecamatan:

1. Tegineneng
2. Padang Cermin;
3. Gedong Tataan.

Gambar 4.14. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pesawaran

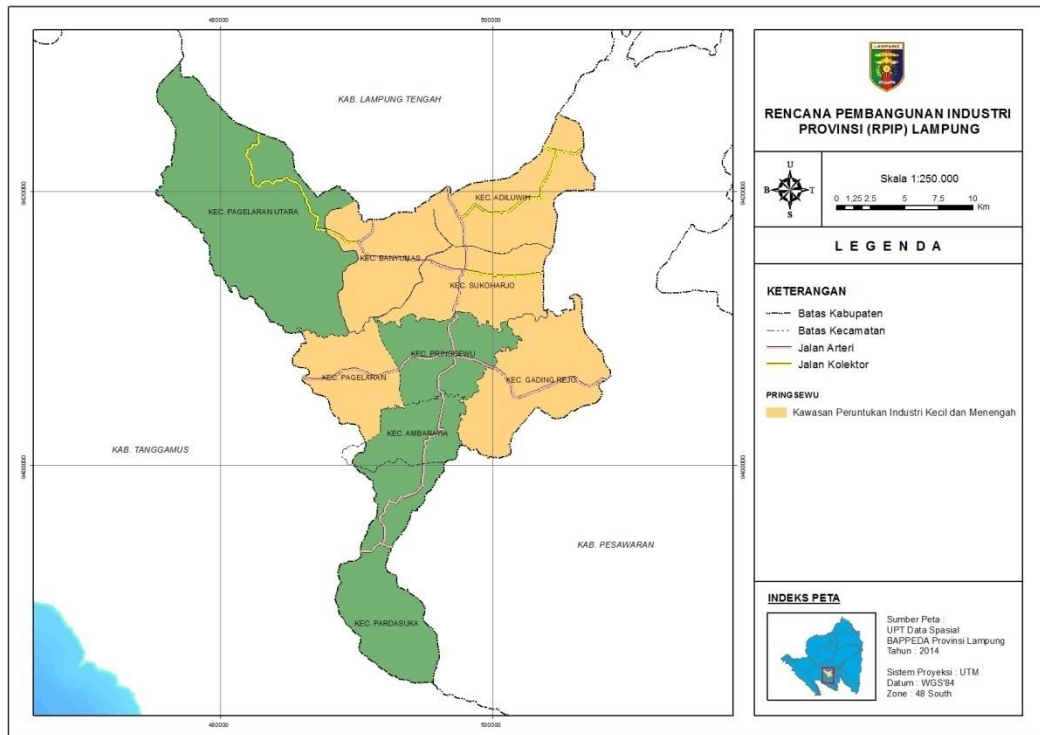


M. Kabupaten Pringsewu

Kawasan peruntukkan industri dialokasikan di wilayah Kecamatan:

- 1. Sukoharjo;
- 2. Pagelaran;
- 3. Gadingrejo;
- 4. Sukoharjo,
- 5. Adiluwih,
- 6. Pagelaran,
- 7. Banyumas dan
- 8. Gadingrejo.

Gambar 4.15. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pringsewu

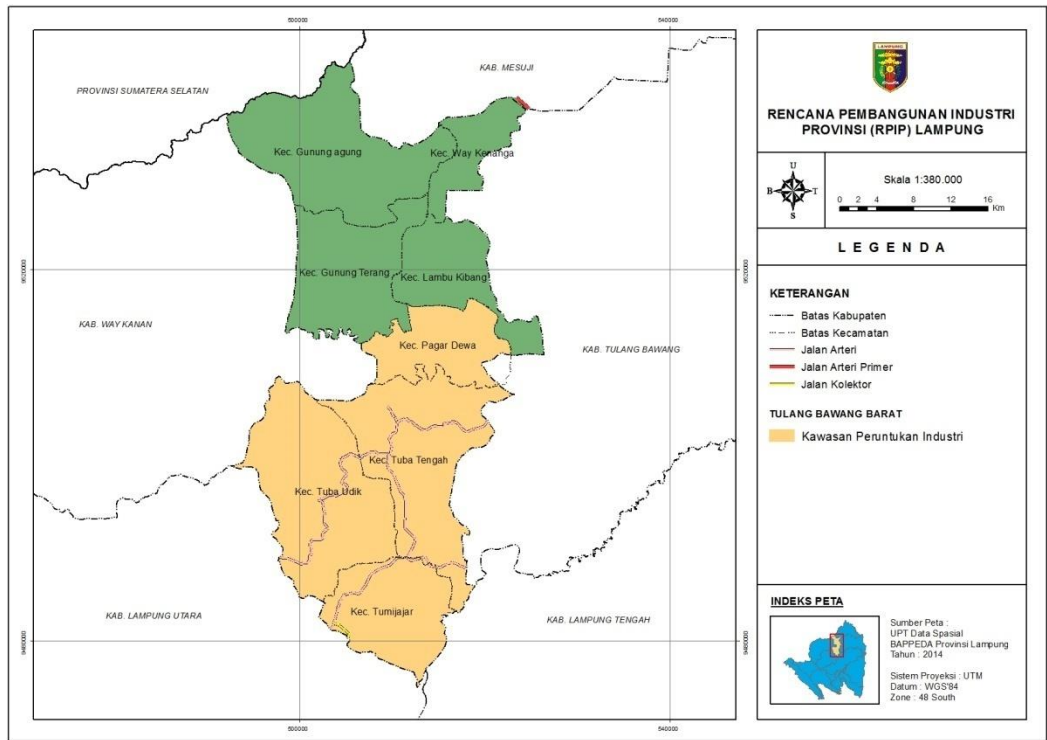


N. Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah industri kecil yang berbasis pada hasil perikanan air tawar dan perkebunan. Wilayah yang menjadi kawasan peruntukan industri meliputi Kecamatan:

- 1. Pagar Dewa,
- 2. Tulang Bawang Udik,
- 3. Tulang Bawang Tengah, dan
- 4. Tumijajar

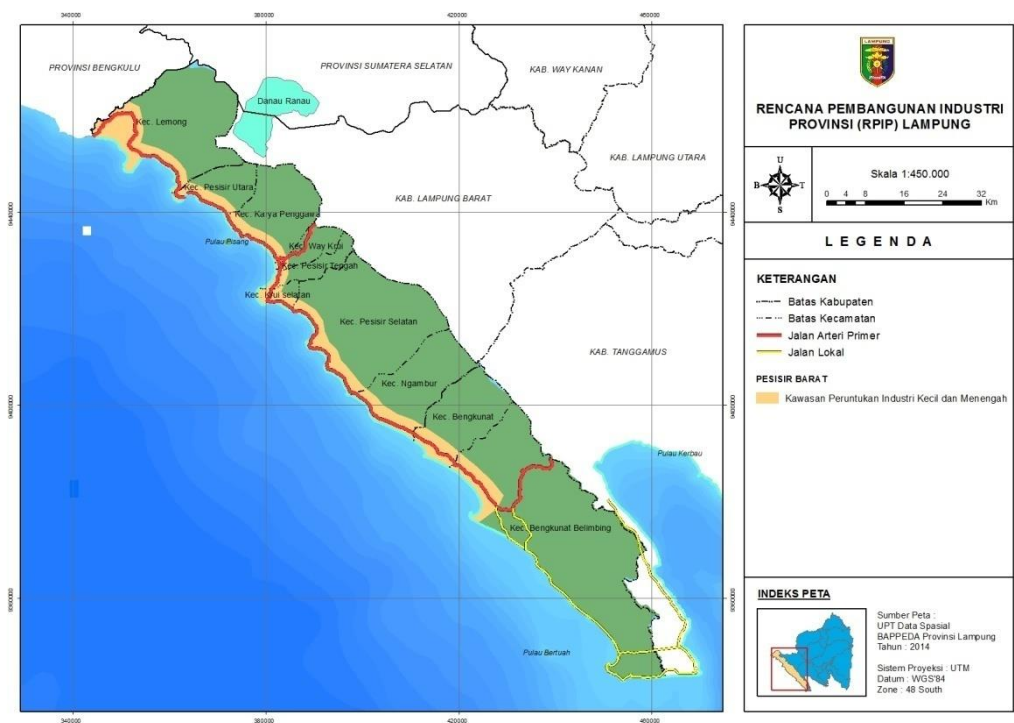
Gambar 4.16. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat



O. Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat yang berlokasi di sepanjang pantai barat Provinsi Lampung sangat potensial dikembangkan sebagai wilayah industri pariwisata. Karenanya dalam strategi pembangunan pariwisata Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Lokasi industri kecil dan menengah berada di sepanjang Jalan Lintas Barat Provinsi Lampung.

Gambar 4.17. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat



4.6. Pembangunan Sumber Daya Industri

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

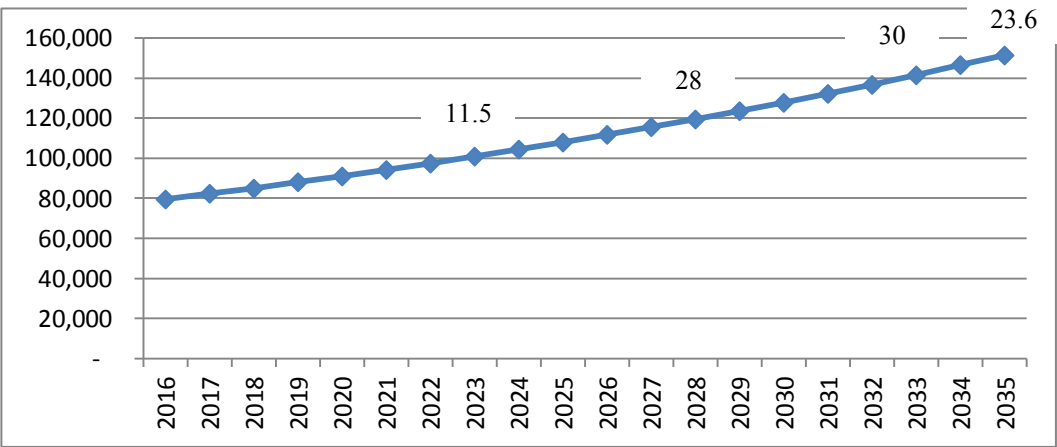
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu merupakan salah satu syarat (*enabling condition*) bagi akselerasi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri. Kementerian Perindustrian perlu lebih berperan dalam meningkatkan ketersediaan SDM bermutu yang dibutuhkan sektor industri.

Perlu dirumuskan kebijakan dan program oleh Dinas Perindustrian dan pemangku kepentingan lain, untuk mendorong peningkatan mutu dan jumlah pasokan SDM industri.

Pemenuhan kebutuhan SDM Industri menghadapi tiga persoalan berikut. Pertama, persoalan aturan hukum dan perundangan yang sering menimbulkan hubungan kurang harmonis antara pekerja dengan perusahaan. Kedua, persoalan kualitas dan kesenjangan keterampilan (*skill gap*), terutama pada SDM tingkat menengah. Ketiga, kekurangan pasokan dan ketidaksesuaian keterampilan (*skill missed-match*), terutama pada SDM tingkat tinggi (manajer dan ahli).

Seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan kontribusi sektor industri, berdampak pada daya serap tenaga kerja terhadap industri. Selama tahun 2010-2015 daya serap tenaga kerja di sektor industri mengalami fluktuasi seiring dengan berfluktuasinya pertumbuhan sektor industri, nama secara rata-rata daya serap tenaga kerja di sektor industri tumbuh sekitar 3.45% pertahun. Pada tahun 2020 dibutuhkan lebih dari 11.5 ribu orang, tahun 2025 diperlukan sekitar 28 ribu tenaga kerja, tahun 2030 sekitar 20 ribu orang dan tahun 2035 sekitar 23.6 ribu orang. Sehingga total kebutuhan tenaga kerja di sektor industri sekitar 83.5 ribu orang. Berikut proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri 20 tahun ke depan:

Gambar 4.18. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Industri s/d Tahun 2035



Sektor pertanian dan jasa yang menyerap tenaga kerja terbesar pertama dan kedua, pada tahun 2015 justru mengalami penurunan 0.4 persen dan 1.3 persen, sementara sektor industri justru meningkat sekitar 24.9%.

Persoalan umum yang dihadapi oleh seluruh sektor industri berkenaan dengan sumber daya manusia, yaitu:

1. Aturan ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penetapan upah minimum dan kewajiban membayar pesangon bagi pekerja tingkat rendah,

seringkali tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ketidakmampuan tersebut seringkali disebabkan karena peningkatan produktivitas pekerja tidak selalu sesuai dengan kenaikan upah.

2. Pasokan tenaga kerja tingkat menengah didominasi oleh lulusan sekolah menengah umum. Kesenjangan keterampilan masih sangat terasa, dimana keterampilan yang dimiliki pekerja lulusan sekolah menengah umum tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Pasokan tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan bidang industri relatif sedikit dibandingkan dengan bidang-bidang lain walaupun pasokan tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan semakin besar.
4. Dibandingkan dengan sekolah menengah umum, kurikulum SMK lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, namun masih belum cukup spesifik untuk memenuhi kebutuhan industri.
5. Pasokan SDM profesional dan ahli bidang industri dirasakan sangat rendah
6. Insentif untuk melatih pekerja dan calon pekerja sangat rendah. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, melatih pekerja agar dapat “melakukan pekerjaan praktis” atau menutup kesenjangan keterampilan (*skill gap*). Pengembangan tenaga profesional dan manajer dilakukan melalui pelatihan informal atau proses *learning by doing*

Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Minat masyarakat untuk menempuh pendidikan profesi di bidang industri dirasakan masih rendah. Menjadi profesional di bidang produksi atau kegiatan pengolahan (*manufacturing*) kalah menarik dibandingkan dengan profesional di sektor jasa, misalnya jasa keuangan.
2. Kapasitas lembaga pendidikan tinggi khusus bidang industri relatif kecil dibandingkan kebutuhan industri. Perluasan kapasitas pendidikan tinggi khusus semacam itu perlu biaya besar.
3. Lulusan universitas kurang memiliki pengetahuan praktis karena universitas kurang beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.
4. Kapasitas lulusan program diploma lebih rendah dari lulusan universitas dan variasi, fleksibilitas kurikulum program diploma belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel 4.11. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Industri	Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi;	Sertifikasi kompetensi
2	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pendidikan	Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;	
3	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pelatihan	Pemagangan Industri	

Sumber: Renstra Disperin Prov Lampung, 2015-2019

Beberapa perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang menyediakan SDM teknologi, antara lain:

Tabel 4.12. Perguruan Tinggi Yang Menyiapkan SDM Teknologi di Provinsi Lampung

No	Nama Perguruan Tinggi	Fakultas
1	Universitas Lampung	1. Teknik 2. Pertanian 3. MIPA
2	Institut Teknologi Sumatera (Itera)	1. Teknik 2. Perencanaan Wilayah
3	Universitas Bandar Lampung	1. Teknik 2. Ilmu Komputer
4	Universitas Saburai	Teknik
5	Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya	Teknologi Informatika
6	Universitas Muhammadiyah Lampung	Teknik
7	Universitas Muhammadiyah Metro	Teknik
8	Universitas Tulang Bawang	Teknik

B. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Tabel 4.13. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2016 – 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi	1. penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam; 2. manajemen pengolahan sumber daya alam; 3. implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi; 4. implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>); dan 5. audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	
2	Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam	1) penetapan bea keluar; 2) penetapan kuota ekspor; 3) penetapan kewajiban pasokan dalam negeri; dan 4) penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam	
3	Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam	1) penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam; 2) penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; 3) pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam; 4) pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu; 5) diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; 6) pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	

Sumber: Renstra Disperin Prov. Lampung 2015-2019

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Kebijaksanaan pemerintah daerah yang selaras dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi adalah merupakan alat yang ampuh di dalam mewujudkan program Industrialisasi, di mana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Provinsi Lampung kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam

"*production process technology*". Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijaksanaan Pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga bangsa Provinsi Lampung mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi SDA menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera. Oleh karenanya pembangunan Industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi industri pada dua puluh tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan di Provinsi Lampung.

Penekanan pada jenis industri yang dilakukan disini adalah pengembangan sektor industri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Jadi industri yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat bahwa sejumlah dan kualitas yang memadai serta harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yaitu Industri Pangan, Sandang, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan.

Tabel 4.14. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2016 - 2035

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Industri Pangan	Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi,isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen
		Teknologi konversi(kimia/fisik) danbiokonversi (fermentasi)	Teknologi konversi dan Biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro
		Teknologi preservasi (pembekuan,pengeringan, Pengawetan dengan gula/garam	Efisiensiproduksi dengan Berbasis teknologi bersih dan hemat energi
		Teknologi formulasi, <i>mixing/blending</i> ,ekstrusi	
		Teknologi kemasan	
		Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal	
2	Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet	Teknologi fabrikasi barang plastik dan karet untuk keperluan umum	Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
3	Industri Hulu Agro	Teknologi daur ulang	Teknologi daur ulang
		Teknologi produksi(ekstraksi, purifikasi, <i>mixing/blending</i> , hidrogenasi,esterifikasi, formulasi) oleofood skala mini dan medium	Teknologi ekstraksi bahan/komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lain <i>betacaroten</i> dan <i>tocoferol</i>)
		Teknologi pemisahan (hidrolisis, <i>splitting</i>), isolasi, hidrogenasi,esterifikasi dan pemurnian <i>specialty fats</i>	Teknologi konversi dan Biokonversi untuk produksi asam organic dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit.
			Teknologi hidrolisis dan biokonversi(enzimatik dan fermentasi)untuk produksi bioetanol denganbahan baku lignoselulosa

Sumber: Renstra Disperin Prov. Lampung 2015-2019

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya.

Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumberdaya alam berlimpah yang dimiliki Provinsi Lampung saat ini harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan daerah ini sebagai daerah yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan regional dan nasional dengan provinsi-provinsi lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Untuk membangun kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematis. Apalagi dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini dihadapkan pada tantangan munculnya persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Adanya persaingan bebas

ini akan menyebabkan Indonesia dan Provinsi Lampung khususnya “diserbu” berbagai macam produk dan teknologi baru dari negara lain khususnya ASEAN.

Kerjasama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan stratejik dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan daerah, regional dan nasional.

Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk industri yang strategis bagi kepentingan daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri.

Pemerintah provinsi bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan lembaga manufaktur/industri.Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di daerah.

Dengan demikian, budaya penelitian (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia industri Provinsi Lampung, dan budaya industri (yang bernuansa *time to market*) akan tumbuh pula di perguruan tinggi di daerah.

Tabel 4.15. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Program Kerjasama Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan Pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia Usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	
2	Program Pertumbuhan Pusat	a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat	

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
	Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	dalam berkreativitas dan berinovasi; b. pengembangan sentra industri kreatif; c. pelatihan teknologi dan desain; d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	
3	Program Pengembangan Industri Kreatif	1) Pembangunan Tecno Park 2) Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; 3) Pembangunan upt; 4) Bantuan desain dan tenaga ahli ; dan 5) Fasilitasi pembiayaan	
4	Program Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	1) Pelatihan desain dan teknologi; dan 2) Bantuan tenaga ahli	
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif	1) Promosi dan pameran di dalam negeri; 2) Promosi dan pameran di luar negeri; dan 3) Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri	

Industri kreatif merupakan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Industri kreatif domestik menghadapi tantangan dalam era pasar bebas ASEAN sekarang ini. Industri kreatif Thailand dan Vietnam kerap disebut memiliki karakteristik paling serupa dengan Indonesia. Berbeda dengan Singapura yang memiliki kekuatan di bidang teknologi dan Malaysia yang seimbang dalam hal teknologi serta inovasi budaya.

Survei INSEAD dalam mengukur Indeks Inovasi Global di tahun 2014, mendudukan Indonesia di peringkat 87 dari 126 negara, meningkat dari peringkat 99 pada 2012. Meskipun Indonesia telah menunjukkan peningkatan, peringkat negara-negara tetangga seperti Vietnam (71) dan Thailand (48) masih tetap unggul dari Indonesia. Sedangkan, peringkat ekspor barang kreatif Indonesia tumbuh menjadi peringkat 25 di tahun 2014 dari peringkat 85 di tahun sebelumnya.

Provinsi Lampung juga tidak boleh ketinggalan dengan industri kreatifnya seperti fesyen, cenderamata, lukisan, music, film, dan tentu saja kuliner.

E. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relative tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang.

Tabel 4.16. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Program Fasilitasi Permodalan Bagi IKM	Menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank)	

Alternatif model pembiayaan pengembangan industri selain investasi langsung dan kerjasama juga dapat menggunakan sistem BOT (*build operate and transfer*) atau BOO (*build operate and over*)

4.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi,

fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

A. Pengelolaan Lingkungan

Industri kerap kali dikaitkan sebagai penyebab terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan, karena itu pembangunan industri disertai dengan program-program pengelolaan lingkungan sebagaimana Tabel 4.16.

Tabel 4.17. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	X	X
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	X	X
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	X	

B. Lahan

Strategi pembangunan yang berorientasi pada industri sudah dipastikan membutuhkan ketersediaan lahan yang akan menjadi lokasi kawasan peruntukan maupun kawasan industri. Beberapa wilayah di Provinsi Lampung berpotensi menjadi Kawasan Industri sebagaimana Tabel 4.17.

Tabel 4.18. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus	Pengembangan/P embangunan	Pengembangan/ Pembangunan
2	Kawasan Industri Way Pisang. Lamsel	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
3	Kawasan Industri Mesuji	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
4	Kawasan Industri Lamteng (Sulusuban)	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
5	Kawasan Industri Way Kanan	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
6	Kawasan Industri Tulang Bawang Barat	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
7	Kawasan Industri Tulang Bawang	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
8	Kawasan Industri Lampung (KAIL II)	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
9	Kawasan Industri Katibung, Lampung Selatan	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri

C. Jaringan Energi dan Kelistrikan

1. Kondisi Kelistrikan Lampung

Total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 adalah sekitar 737 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sekitar 709 MW, IPP sekitar 12 MW, dan IO non BBM sekitar 16 MW. Adapun berdasarkan jenisnya, kapasitas terpasang pembangkit tersebut terdiri dari PLTA sekitar 118 MW, PLTU batubara sekitar 328 MW, PLTP sekitar 110 MW, dan PLTD sekitar 181 MW. IO Non BBM terdiri dari pembangkit milik PT Bukit Asam.

Konsumsi tenaga listrik untuk Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2014 adalah sekitar 3.392 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai untuk rumah tangga sekitar 2.069 GWh (61%), bisnis sekitar 399 GWh (11,8%), industri sekitar 710 GWh (20,9%), dan publik sekitar 215 GWh (6,3%). Rasio elektrifikasi tahun 2014 adalah sekitar 81,27%.

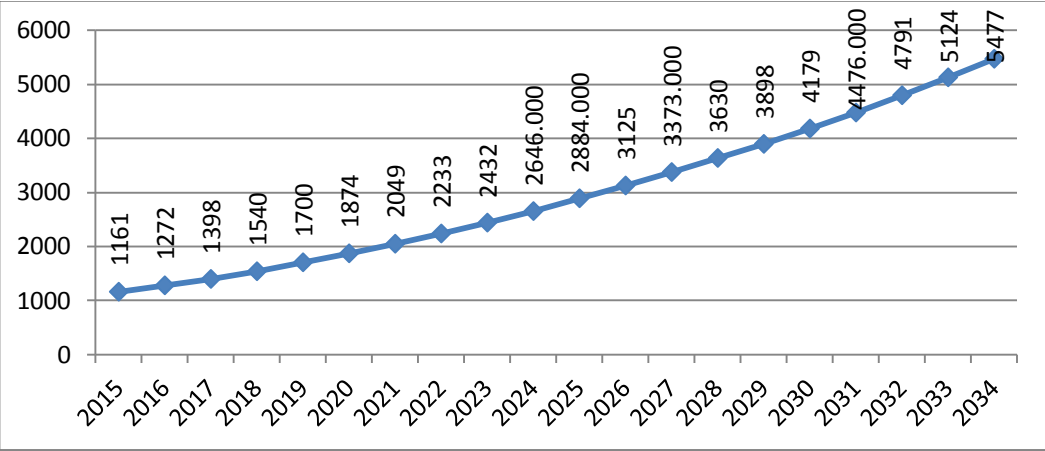
2. Proyeksi kebutuhan Tenaga Listrik

Rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung ditargetkan meningkat dari sekitar 84.79 % pada tahun 2015 menjadi sekitar 100% pada tahun 2021. Untuk mencapainya diperlukan kenaikan jumlah rumah tangga berlistrik rata-rata sekitar 75.094 rumah tangga per tahun. Sementara itu untuk mempertahankan rasio elektrifikasi sekitar 100% sampai dengan tahun 2034 diperlukan kenaikan jumlah rumah tangga berlistrik rata-rata sekitar 10.381 rumah tangga per tahun.

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Lampung diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 9.8 % pertahun dalam periode 10 tahun ke depan, atau sekitar 8.7 % pertahun untuk periode 20 tahun ke depan.

Khusus untuk kebutuhan industri diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 12.6% pertahun dalam periode 10 tahun ke depan, atau sekitar 10.6% pertahun untuk periode 20 tahun ke depan.

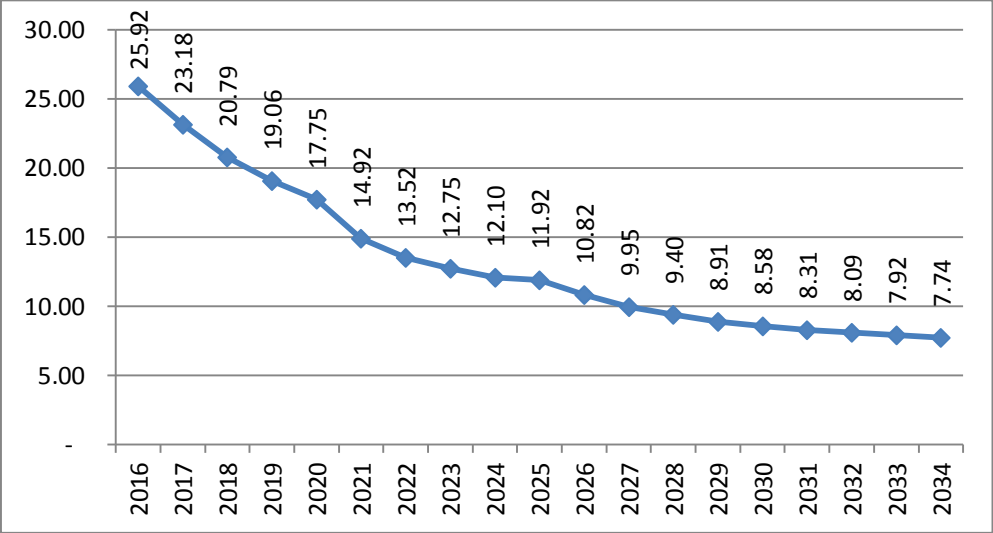
Gambar 4.19. Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik di Lampung Tahun 2015-2034 (MW)



Sumber: RUPTL, 2015 (data diolah)

Berdasarkan proyeksi tersebut, kebutuhan tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 3,996 GWh pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 9,239 GWh pada tahun 2024 dan 19,446 GWh pada tahun 2034.

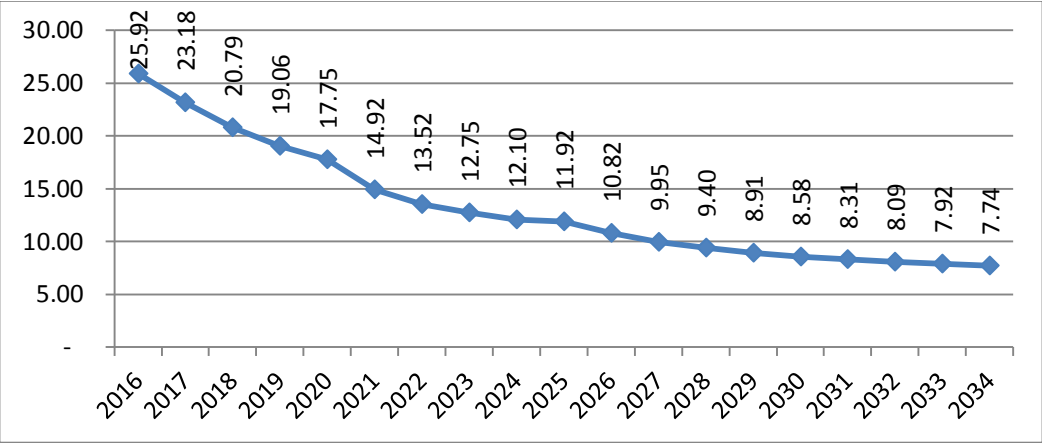
Gambar 4.20. Proyeksi Kebutuhan Listrik untuk Industri Lampung 2016-2034 (%)



Sumber: RUPTL, 2015 (data diolah)

Selama 10 tahun ke depan kebutuhan tambahan daya listrik rata-rata sekitar 17.2% pertahun, atau sekitar 13.2% pertahun dalam kurun waktu 20 tahun.

Gambar 4.21. Proyeksi Pertumbuhan Kebutuhan Tambahan Daya Listrik di Lampung Tahun 2016-2034 (%)

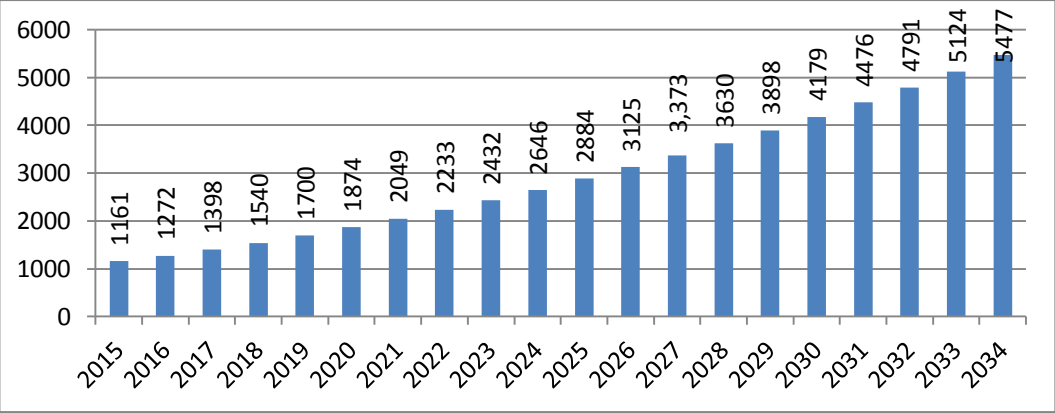


Sumber: RUPTL, 2015 (data diolah)

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang tinggi tersebut, maka dalam periode 10 tahun ke depan diperlukan tambahan kapasitas rata-rata sekitar 212 MW pertahun, untuk periode 20 tahun rata-rata sekitar 255 MW pertahun. Dengan pertambahan kapasitas tersebut, pasokan tenaga listrik di Provinsi Lampung akan meningkat dari sekitar 1,161 MW pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,646 MW pada tahun 2024 dan 5,477 MW pada tahun 2034. Adapun penambahan pasokan tenaga listrik tersebut dapat berasal dari penambahan pembangkit di Provinsi Lampung sendiri maupun transfer daya dari provinsi lain melalui sistem penyaluran.

Kemampuan sumberdaya listrik baik dari PLN dan non PLN terus ditambah seiring dengan peningkatan kebutuhan.Kapasitas listrik tahun berjalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan listrik. Secara grafik adalah sebagai berikut:

Gambar 4.22. Kapasitas Listrik Tahun Berjalan di Provinsi Lampung menurut proyeksi PLN tahun 2015-2034

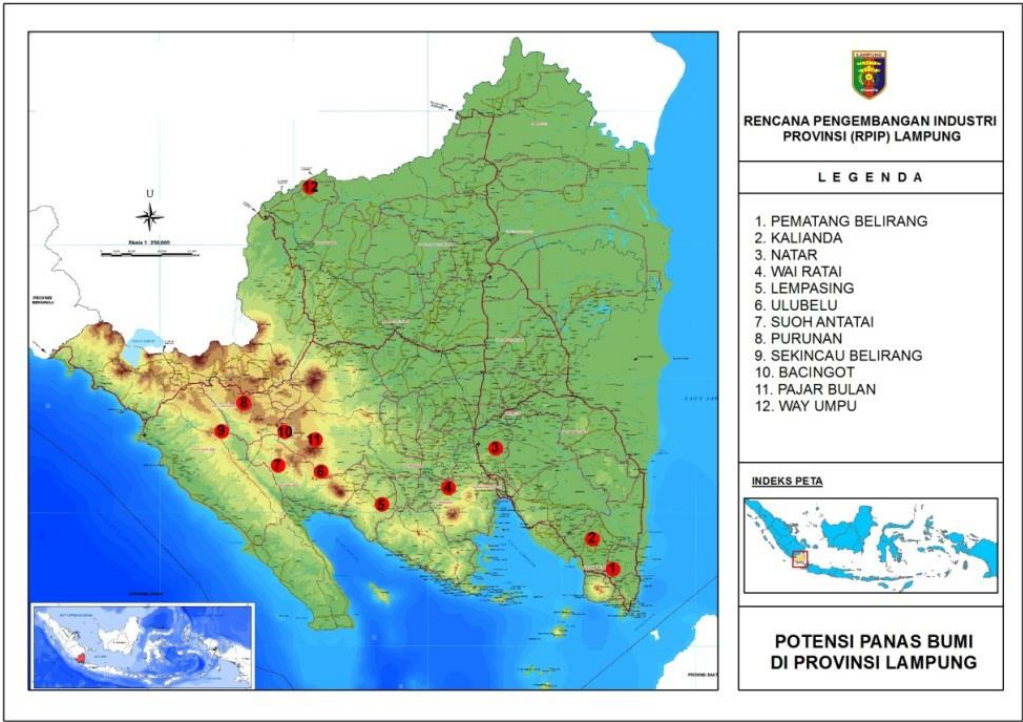


Sumber: RUPTL, 2015

D. Potensi Sumber Energi Primer

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari batubara, tenaga air dan panas bumi, potensi batubara sekitar 107,89 juta ton. Potensi panas bumi diperkirakan juga sangat besar yaitu mencapai 2.658 MWe yang terdapat di 13 lokasi diantaranya di daerah Wai Umpu, Danau Ranau, Purunan, G. Sekincau, Bacingot, Suoh Antatai, Fajar Bulan, Natar, Ulubelu, Lempasing, Wai Ratai, Kalianda dan Pematang Belirang (RUPTL , 2015).

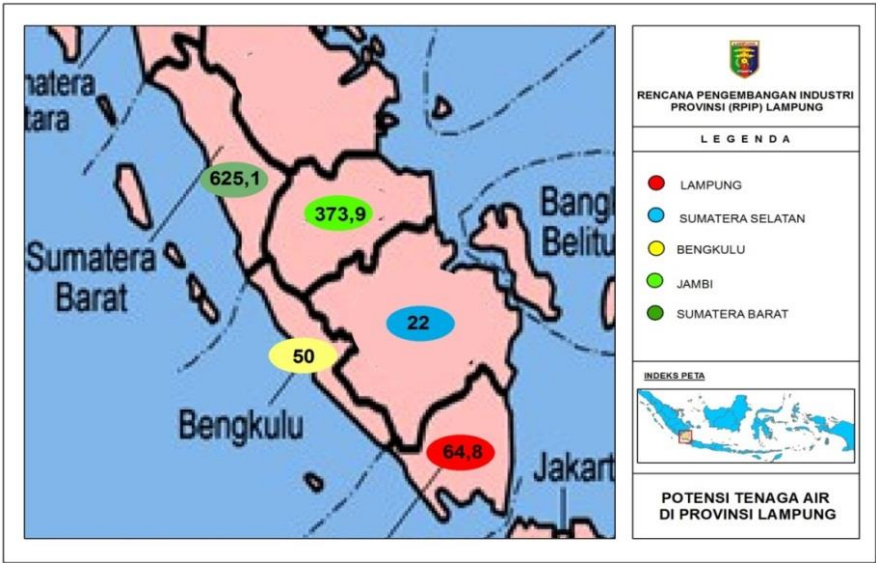
Gambar 4.23. Peta Potensi Panas Bumi (dalam MWe)



Sumber: Buku Statistik EBTKE 2014, Ditjen EBTKE, RUPTL 2015

Selain potensi panas bumi, Provinsi Lampung juga memiliki potensi tenaga air untuk skala besar adalah 64,8 MW berada pada 2 lokasi yaitu Semung-3, dan Besai-2 sebagaimana hasil studi JICA & Nippon KOEI Tahun 2011 seperti gambar 4.24.

Gambar 4.24. Potensi SDA di Provinsi Lampung mampu menjadi tenaga listrik sebesar 64.8 MW



Sumber: *Final Report of Project for the Master Plan Study of Hydropower Development in Indonesia*, JICA & Nippon Koei, CO. LTD, 2011

Hingga 10 dan 20 tahun ke depan PLN Lampung merencanakan pengembangan kelistrikan sebagaimana Tabel 4.19:

Tabel 4.19. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Tambahan Daya Tersambung (273.5 MVA)	X	
2	Pembangkit (1.071 MW)		X
3	Penambahan jaringan Transmisi Lintas Timur	X	
4	Perluasan Jaringan Transmisi		X
5	Penambahan Gardu Induk	X	
6	PLTA Semangka 56 MW		X
7	PLTG/MG Mobile PP Sumbagsel 100 MW		X
8	PLTP Ulu Belu Unit 3 dan 4 2x55 MW	X	
9	PLTA Semangka 56 MW	X	
10	PLTP Danau Ranau 2 x 56 MW		X
11	PLTP Rajabasa 2 x 110 MW		X
12	PLTP Suoh-Sekincau 2 x 110 MW		X
13	PLTP Wai Ratai 55 MW		X

E. Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan pelayanan komunikasi di seluruh Provinsi melalui jaringan telekomunikasi terestrial terdiri dari jaringan mikro digital, serat optik, dan mikro analog melalui jaringan kabel laut Sistem jaringan telekomunikasi Provinsi ditetapkan dengan kriteria:

- a. jaringan tersebut menghubungkan pusat perkotaan;
- b. mendukung pengembangan PKN, PKW, PKWp, PKL, kawasan andalan, dan kawasan strategis serta daerah terpencil.

Tabel 4.20. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pengembangan Jaringan Mikro Digital	X	X
2	Pengembangan jaringan serat optik	X	X
3	Pengembangan Jaringan Mikro Analog	X	X

F. Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan industri sangat tergantu pada ketersediaan air, karena itu program yang disiapkan sebagaimana Tabel 4.20.

Tabel 4.21. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pembangunan Daerah Irigasi Jabung 3.324 ha Sal. Primer dan Sekunder Rawa Sragi III AMS 23 Lamtim	X	
2	Pembangunan Daerah Irigasi Jabung 2.314 ha Sal. Primer dan Sekunder Rawa Sragi II AMS 22 Lamtim	X	
3	Rehabilitasi DI Way Seputih lanjutan Lampung Tengah	X	
4	Pembangunan DI Bumi Agung	X	
5	Pembangunan Bendungan Way Sekampung	X	
6	Pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Way Sekampung	X	
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Bakoman Pulau Panggung Tanggamus	X	

G. Jaringan Sanitasi

Program pengembangan jaringan sanitasi adalah sebagaimana Tabel 4.22.

Tabel 4.22. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pembangunan TPA Natar	X	
2	Pembangunan TPA Lampung Tengah	X	

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
3	Pembangunan SPAM Ulu Belu Tanggamus	X	
4	Pembangunan SPAM Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat	X	
5	Pembangunan TPA Tulang Bawang	X	

H. Jaringan Transportasi

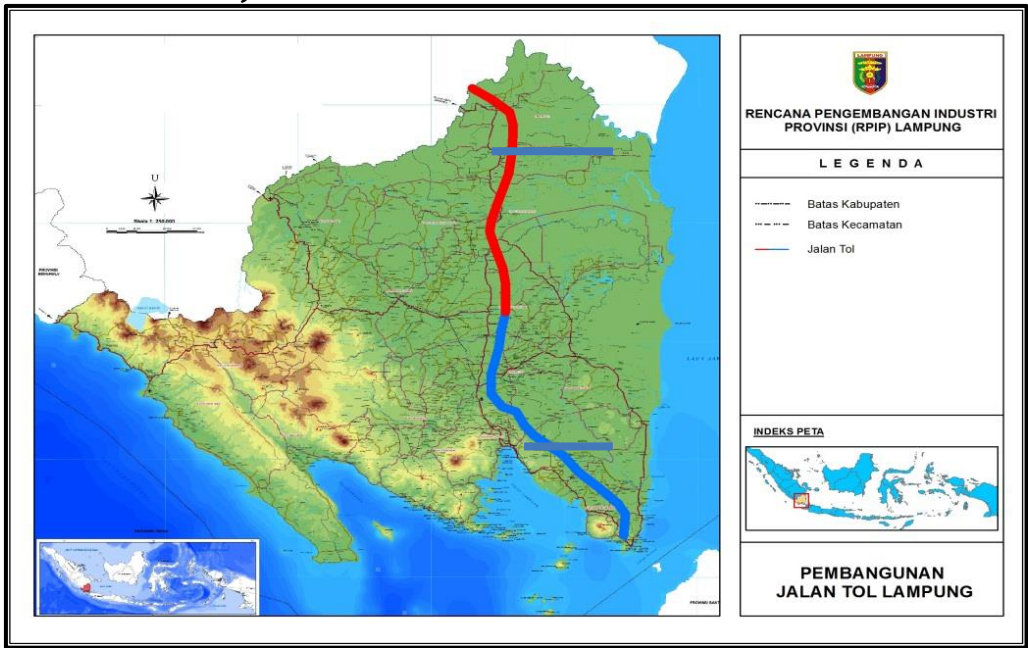
Jaringan transportasi merupakan prasarana vital dalam mendukung pembangunan industri, karena itu kondisi jalan dan jembatan yang mantap terutama pada wilayah-wilayah yang diproyeksikan menjadi kawasan industri harus dipenuhi.

Tabel 4.23. Program Pembangunan Jaringan Transportasi Tahun 2016 – 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Fly Over Pelabuhan Panjang		X
2	Jalan Mesir Ilir-Pakuan Ratu	X	
3	Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Bakauheni 150 km	X	
4	Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 100 km	X	
5	Pembangunan jalan lingkaran barat Bandar Lampung	X	
6	Rekonstruksi jalan batas Way Kanan-Sp Tulung Randu Kab TBB	X	
7	Peningkatan Jalan Akses Tol LARAIN Ruas Jl. Ryacudu-Jl. P. Senopati-Jl. Hendro Suratmin	X	
8	Pembangunan jalan Sp Tak Sebidang-Sp Pelabuhan Panjang	X	
9	Pembangunan Jalan Mesuji-Blambangan Umpu	X	
10	Lingkar Bandar Jaya	X	
11	Pembangunan Trans Sumatera Railways		X
12	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Nasional Simpang Pematang-Rawa Jitu Timur	X	
13	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Simpang Unit VII-Aji Mesir (Rawa Pitu)	X	
14	Peningkatan status Bandar Militer Astra Ksetra menjadi Bandar Militer yang dapat berfungsi sipil		X
15	Pengembangan jaringan transportasi Sungai Tulang Bawang (Tol Sungai)		X
16	Jalan Tol Akses ke Kawasan Industri Mesuji		X
17	Jalan Tol Akses ke Kawasan Industri Way Pisang		X

Prasarana jalan atau jaringan transportasi strategis yang kini tengah dibangun di Provinsi Lampung adalah Jalan Tol mulai dari Bakauheni hingga Mesuji/perbatasan Sumsel sepanjang 239 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Gambar 4.25. Pembangunan Jalan Tol Lampung yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera



Sumber: BPIW Kementerian PUPERA

Jalan Tol Sumatera yang melalui Lampung terdiri atas 2 segmen:

1. Segmen I : Terbanggi besar – Batas Sumsel, sepanjang : 100 km.
2. Segmen II : Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang : 139 Km, meliputi tiga ruas, yaitu:
 - Bakauheni - Babatan (54,15 km)
 - Babatan – Tegineneng (46,50 km)
 - Tegineneng - Terbanggi Besar (38,35 km)

I. Sistem Informasi Industri

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan

mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Tabel 4.24. Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Tahun 2016 – 2035

No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pengembangan Website Perindustrian	1. Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal; 2. Informasi potensi investasi sektor industri	1. Sistem pelayanan perizinan secara <i>on-line</i> ;

J. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Persaingan produk industri akan sangat ditentukan oleh terpenuhinya standar yang berlaku karena pasar hanya akan menerima produk barang yang telah tersertifikasi dalam prosesnya. Standar tersebut dapat berupa standar nasional (SNI), ISO, maupun produk halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk itu.

Tabel 4.25. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Tahun 2016 – 2035

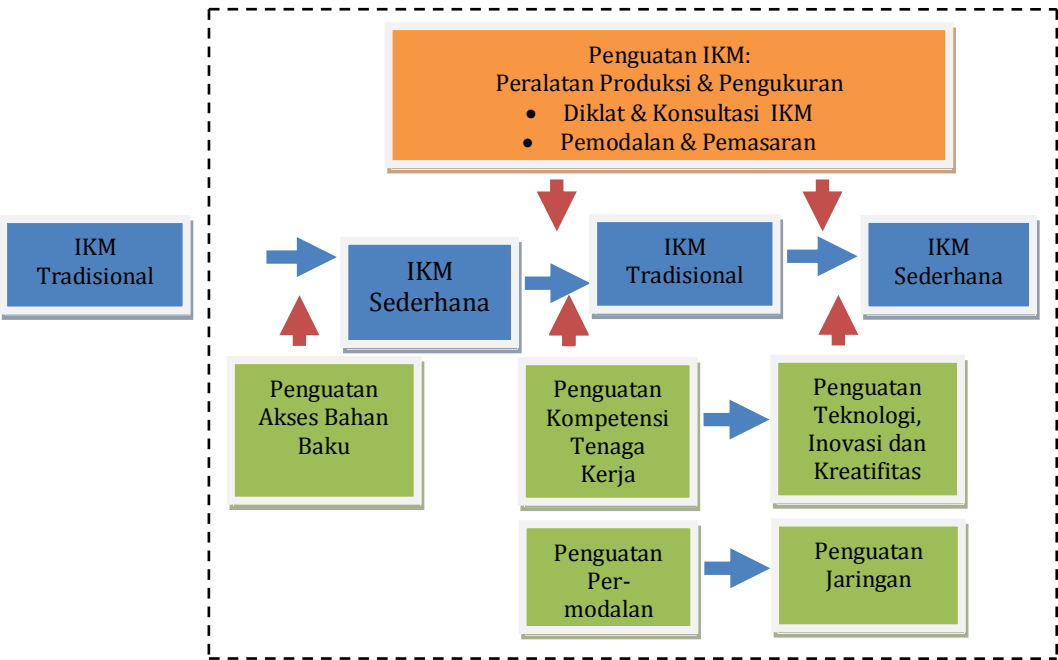
No.	Program	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Program pengembangan standardisasi industri	pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiscal maupun non fiscal	
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	a. pengembangan lembaga penilai kesesuaian; b. pengembangan pengawasan standar; c. penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri	

4.8. Pemberdayaan IKM

Di Provinsi Lampung, telah diidentifikasi ada lebih dari 76 ribu industri mikro dan sekitar 3.777 unit industri kecil dengan tenaga kerja terserap lebih dari 230 ribu orang. Industri mikro dan kecil harus ditumbuhkembangkan, karena memiliki daya tahan saat krisis, menjadi “katup pengaman” (*safety valve*) ketika terjadi PHK massal pada industri-industri besar.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 4.26. Tahapan Pengembangan IKM



Sumber: RIPIN 2015-2035

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2016 - 2035

No.	Program/Kegiatan	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
1	Pameran Agro Expo	5	5
2	Diversifikasi olahan pangan berbasis ubi kayu dan turunannya (mocaf)	60	100
3	Peningkatan kualitas produk olahan pangan berbasis hortikultura dan ikan	150	200
4	Bimbingan dan Konsultasi Pengembangan Desain Kemasan dan Merek Dalam Rangka Meningkatkan	25	50

No.	Program/Kegiatan	Tahun	
		2016-2019	2020-2035
	Daya Saing		
5	Pengembangan Industri Agro Komoditi Unggulan Provinsi Lampung	80	100
6	Pengembangan Industri Rumput Laut	60	80
7	Fasilitasi Pameran Crafina	1	2
8	Fasilitasi Pameran Inacraft	1	2
9	Fasilitasi Pameran Produk Khas dan Unggulan Daerah	1	2
10	Fasiltasi Promosi Produk Kerajinan Khas dan Unggulan Daerah	6	10
11	Pameran Produk IKM Makanan dan Minuman	3	5
12	Pameran Produk IKM Unggulan dan Khas daerah	18	20
13	Pengembangan Industri Olahan Pangan Berbasis Komoditi Hasil Perkebunan dan Kehutanan	60	80
14	Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan	80	100
15	Pengembangan Industri Kerajinan dan Olahan Kulit	220	300
16	Pengembangan Industri Furniture	100	120
17	Pengembangan Industri Sandang dan Tenun/Kain Tradisional	160	200
18	Bimtek Industri Kreatif Batik dan Bordir Bagi Kelompok Usaha Baru	60	80
19	Bimtek Industri Kreatif Sulam Maduaro	30	50
20	Bimtek Peningkatan Mutu Pengolahan Lada dan Diversifikasi Cacao (coklat)	30	40
21	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Meubeler	30	50
22	Pengembangan DEKRANASDA	16	20
23	Pengembangan IKM Makanan berbasis Hasil Pertanian	130	150
24	Pengembangan IKM Makanan dan Minuman berbasis Hasil Peternakan, Perikanan dan Kelautan	60	100
25	Pengembangan IKM Berbahan Baku Tanah Liat	80	80
26	Pengembangan IKM Logam dan Mesin	85	100
27	Peningkatan Mutu Produk IKM Makanan Hasil Pertanian	90	100
28	Peningkatan Mutu Produk IKM Makanan dan Minuman Hasil Perkebunan dan Kehutanan	90	120
29	Peningkatan Mutu Produk IKM Makanan dan Minuman Hasil Peternakan, Perikanan dan Kelautan	90	120
30	Peningkatan Mutu Produk IKM Kerajinan dan Kulit	45	60
31	Peningkatan Mutu Produk IKM Sandang, Kain/Tenun Tradisional	210	250
32	Inkubasi Bisnis	2	5

Sumber: Renstra Disperin Prov. Lampung, 2015-2019

4.9. Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

- a. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perlindungan terutama industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. dalam rangka penguatan struktur industri daerah, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- c. dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah Daerah akan menjadi pelindung dan fasilitator terhadap akses permodalan dan pasokan terhadap industri besar dan fasilitas lainnya guna menjaga dan mengembangkan eksistensi IKM

Tabel 4.27. Strategi Kebijakan Pengembangan IKM

No	Jenis Industri	Jangka Menengah
1	IKM Makanan Ringan	• Melakukan diversifikasi produk-produk makanan ringan berbasis potensi bahan baku daerah; • Melakukan dan mengembangkan produk makanan ringan tradisional; • Melakukan penerapan sistem jaminan mutu (GMF, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI); • Melakukan teknologi proses dan peralatan yang maju dan efisien; • Meningkatkan kualitas pengemasan dan penggunaan merek; • Melakukan pemasaran melalui outlet di pusat pasar tradisional dan lokasi potensial lainnya; • Melakukan wirausaha baru.

No	Jenis Industri	Jangka Menengah
2	IKM Obat Herbal	• Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mutu produk dengan perbaikan metode kerja, pengembangan teknologi dan penerapan GA1P melalui pendirian dan penguatan UPL dan pemberdayaan tenaga penyuluh serta penguatan UPT; • Memperkuat kelembagaan pelaku usaha obat herbal; • Meningkatkan investasi pada pusat-pusat bahan baku; • Meningkatkan jumlah dan penerapan SNI; • Mendorong untuk melakukan modernisasi dan standarisasi alat penyulingan dan pengolahan obat herbal; • Menumbuhkan wirausaha baru; • Meningkatkan kompetensi SDM IKM;
3	IKM Gerabah dan Keramik Hias	• Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan penguatan dan pemanfaatan UPL IKM; • Mendirikan pusat-pusat penyiapan bahan baku setengah jadi yang standar; • Melakukan revitalisasi UPT • Meningkatkan penerapan HaKI; • Meningkatkan mutu dan produktifitas serta dengan pendekatan promosi dan pemasaran intensif OVOP dan kerjasama dengan perhotelan; • Mendorong untuk melakukan modernisasi mesin dan peralatan di sentra produksi; • Menumbuhkan wirausaha baru; • Meningkatkan kompetensi SDM.
5	IKM Industri Kreatif	• Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk melalui bantuan tenaga ahli dan pemberdayaan UPL; • Melakukan revitalisasi UPT; • Mengamankan jaminan pasokan bahan baku industri kreatif; • Mengembangkan dan memperkuat industri kreatif di pusat-pusat bahan baku; • Meningkatkan mutu dan produktifitas serta promosi dan pemasaran melalui pendekatan OVOP; • Mengembangkan sentra industri kreatif sebagai daerah tujuan wisata serta fasilitasi pendirian pasar seni; • Menumbuhkan wirausaha baru; • Meningkatkan kompetensi SDM IKM.

No	Jenis Industri	Jangka Menengah
6	Industri Kayu dan Barang Kayu (Termasuk Rotan dan Bambu)	• Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah produsen kayu/rotan dengan produsen mebel kayu dan rotan dalam rangka penyediaan bahan baku kayu; • Memfasilitasi pembangunan terminal kayu/rotan di beberapa tempat sentra produksi mebel; • Meningkatkan mutu dan disain mebel kayu dan mebel rotan; • Mempercepat tumbuhnya industri pengolahan kayu di daerah sumber bahan baku; • Mempercepat penggunaan teknologi modern yang mengadopsi keunggulan dan keunikan lokal; • Mengembangkan pusat disain industri mebel kayu dan mebel rotan;
7	Industri Karet dan barang Karet	• Meningkatkan mutu bahan olah karet (bokar); • Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan standar kompetensi kerja SDM industri karet dan barang-barang karet; • Menyusun dan menerapkan SNI barang-barang karet dalam rangka keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L); • Merestrukturisasi mesin peralatan dan proses produksi industri komponen dan barang-barang karet.
8	Industri mesin dan Peralatan Umum	• Menetapkan insentif untuk litbang industri mesin dan peralatan; • Menumbuhkan industri motor penggerak murah dan industri komponen (supporting industry); • Mengoptimalkan kapasitas dan peran lembaga litbang dalam mendukung pengembangan industri mesin peralatan; • Melakukan kerjasama dengan luar negeri dalam membangun kemampuan infrastruktur dasar industri engineering. • Menyusun dan menerapkan SNI komponen logam, elektronika dan alat mesin pertanian; • Revitalisasi dan mendirikan UPT Industri Kecil dan Menengah Komponen Mesin dan Peralatan Umum.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP Lampung menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategik SKPD Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. RPIP Lampung juga sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003